



RENCANA KERJA RENJA TAHUN 2024



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAMBI**

KATA PENGANTAR

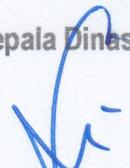
Puji syukur kita ucapkan ke hadirat Allah SWT, hanya berkat karunia-Nya Dinas Kelautan dan Perikanan telah menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Untuk melanjutkan serta meningkatkan kinerja pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Jambi maka disusunlah Rencana Kerja (RENJA) OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi untuk Tahun 2024.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya sehingga penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tahun 2024 ini dapat berjalan sesuai rencana, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Rencana Kerja (RENJA) ini dalam pengerjaan cukup banyak keterbatasan yang dialami, untuk itu kami mohon berbagai masukan dan saran guna melengkapi dokumen ini untuk dapat mewujudkan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai daya saing komparatif dan kompetitif.

Jambi, Juli 2023

Kepala Dinas,


TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Madya
NIP. 19681021 199903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal. i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
II. EVALUASI RENJA OPD TAHUN 2022	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	30
2.4. Reviu Terhadap RKPD Tahun 2024	34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	58
III. TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	59
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	60
3.3. Program dan Kegiatan.....	61
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	96
V PENUTUP.....	109
LAMPIRAN	111

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Jambi mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- 1) RENJA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi Kepala Daerah dan program/Kegiatan Perangkat Daerah;
- 2) RENJA Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2024.
- 3) RENJA Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut.

Munculnya paradigma untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan : Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju kuat dan berbasis kepentingan Nasional.

Untuk itu perlu pelaksanaan konsep *blue economy* dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan berbagai inovasi yang berorientasi pada pelestarian sumberdaya untuk memberikan manfaat secara ekonomi, sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Pengembangan *blue economy* tersebut diharapkan dapat menciptakan daya saing yang lebih tinggi melalui inovasi dan efisiensi yang berkelanjutan, melakukan pembangunan tanpa merusak lingkungan, menciptakan berbagai industri baru di bidang kelautan dan perikanan, serta menciptakan lapangan kerja. Upaya pengembangan *blue economy* perlu pula diiringi upaya untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan dan perikanan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta upaya untuk mengelola wilayah laut nasional secara terintegrasi.

Terwujudnya *good governance* dalam praktek-praktek pemerintahan dan kenegaraan merupakan harapan semua pihak. Saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tiga pilar utamanya yaitu *partisipasi, transparansi dan akuntabilitas*.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan perwujudan dari *Good Governance*, dengan memerlukan pengembangan dan penerapan system perencanaan yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*.

Penyesuaian dokumen rancangan awal Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2024 dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah Jambi dan arahan menteri Kelautan dan Perikanan. Program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian anggaran untuk dilaksanakan, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi dengan program pembangunan lainnya secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan, dan berbasis masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan program kelautan dan perikanan harus "DIMANTAPKAN" secara berkelanjutan melalui integrasi dan koordinasi yang terus menerus.

Semangat untuk menghasilkan kemajuan di bidang kelautan dan perikanan didorong oleh motivasi yang kuat untuk menggali dan memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diberi wewenang untuk mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan demi kesejahteraan masyarakat Jambi, khususnya masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasaran ikan, serta untuk meningkatkan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja OPD ini dituangkan melalui beberapa peraturan perundang –undangan, antara lain:

1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah.
8. Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

9. Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun dokumen perencanaan tahun mendatang
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.25/2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala OPD untuk menyiapkan Renstra OPD, keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dengan RPJMD dan Renstra OPD, Pokok-pokok isi dokumen Renstra OPD, Status hukum Renstra OPD. Renstra OPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja OPD.
11. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
12. Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Jambi.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Tahun 2005-2005;
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud utama penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 adalah agar dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan utama penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 adalah :

- 1) Menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Perangkat Daerah dengan menggunakan pagu dana indikatif beserta sumbernya yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya;

- 2) Memberikan arah dan acuan bagi seluruh pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati. Seluruh upaya dilakukan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dengan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024 | BAB I - V koordinasi dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
- 3) Untuk menjadi bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dalam pelaksanaan program kegiatan lebih efektif dan efisien;
- 4) Untuk memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dan dengan stakeholder lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- 5) Sebagai media pengukur kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi;
- 6) Sebagai bahan dalam evaluasi untuk penetapan strategi pelaksanaan program kegiatan di waktu atau tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Renja OPD dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

1. BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1. Latar Belakang.

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen

2. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) 2023, mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Prediksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2023).

Memuat prediksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun berjalan (Tahun 2023) menyesuaikan dengan target yang telah ditetapkan

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai :

- a. Sejauh mana tingkat kinerja OPD,
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD,
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*),
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan kinerja OPD,
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Memuat Rancangan Awal RKPD sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran.

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Memuat Usulan program dan kegiatan masyarakat yang merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan.

3. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan,
- d. pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

4. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

5. BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan,
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB 2

EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2022 telah merumuskan sasaran-sasaran strategisnya melalui program dan kegiatan pembangunan. Keberhasilan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Target dan realisasi capaian kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Keterangan
1.	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	54.480,90	55.347,45	101,59%	
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	57.168,00	49.665,87	86,88%	
2.	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K	2 izin	0	0,00%	Tidak tercapai dikarenakan Dengan adanya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja & PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Permen KP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, bahwa persetujuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) harus mendapat persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan dan sampai saat ini seluruh persetujuan KKPRL merupakan kewenangan Pemerintah Pusat
		Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	10.687,49	0	0,00%	Belum tersedianya anggaran
		Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	60%	84%	140%	
		Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	50%	50%	100%	
3.	Meningkatnya pelaku usaha perikanan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	27.615	30.303	109,73%	
4.	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	40,60	40,80	100,49%	
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	BB Indeks	BB Indeks	100,00%	

Keterangan :

(*) Angka Sementara

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi memiliki 9 (sembilan) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 5 (lima) sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Jambi. Pada tahun 2022, indikator sasaran tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan dari total indikator dengan rata-rata persentase capaian sasaran sebesar 92,57%.

Sasaran #1 Meningkatnya Produksi Perikanan

Sasaran ini dicapai memiliki 2 (dua) indikator sasaran yaitu: (1) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton), dan; (2) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton). Indikator pertama yaitu Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton) dicapai melalui program pengelolaan perikanan tangkap yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Pengelolaan Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 mil
- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

Sedangkan indikator kedua yaitu Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton) dicapai melalui program pengelolaan perikanan budidaya yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Capaian Realisasi Kinerja Meningkatnya Produksi Perikanan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Awal RPJMD 2021	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022 %	Target 2026	Capaian s/d 2022 terhadap target 2026
1.	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	54.857,3	54.480,90	101,59%	55.800,3	97,63%
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	49.428,9	57.168,00	86,88%	64.843,6	77,77%

Untuk indikator pertama yaitu jumlah produksi perikanan tangkap dengan target indikator di tahun 2022 sebesar 54.480,90 ton telah terealisasi sebesar 55.347,45 dengan capaian sebesar 101,59%. Dapat dikatakan untuk indikator jumlah produksi perikanan tangkap capaian tahun 2022 sudah hampir memenuhi target. Sedangkan untuk indikator kedua yaitu jumlah produksi perikanan budidaya dengan target indikator sebesar 57.168,00 ton telah terealisasi sebesar 49.665,87 ton dengan capaian sebesar 86,88%. Sehingga dapat dikatakan bahwa capaian rata-rata untuk sasaran meningkatnya produksi perikanan adalah sebesar 94,10%.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

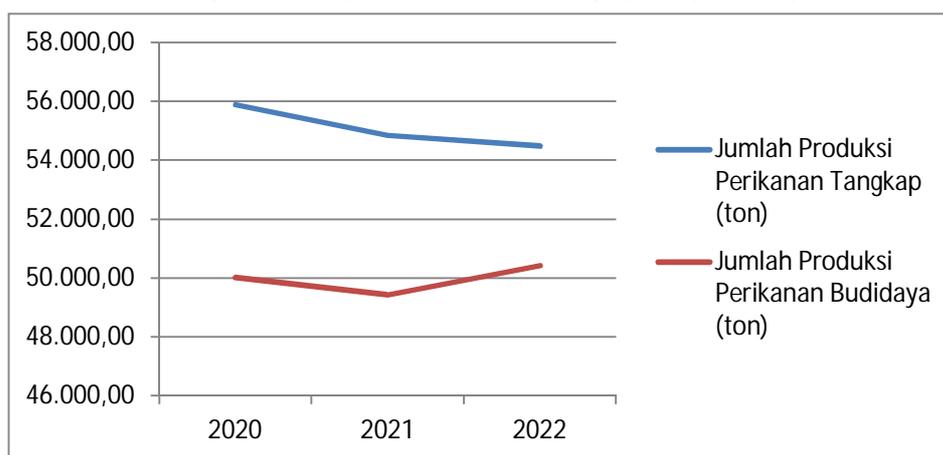
Tabel 2.3. Realisasi Kinerja pencapaian sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Tahun 2022 serta Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Realisasi		Realisasi		
			2020	2021	Target	Realisasi*	% capaian
1	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	55.892,3	54.857,3	54.480,9	55.347,45	101,59%
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	50.015,5	49.428,9	57.168,0	49.665,87	86,88%

*Realisasi sementara

Untuk kedua indikator pada sasaran ini pada tahun-tahun sebelumnya belum ditargetkan sehingga tidak dapat membandingkan capaian sehingga yang dibandingkan adalah realisasinya. Untuk lebih jelasnya perbandingan realisasi jumlah produksi perikanan tangkap dan jumlah produksi perikanan budidaya dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1 Perbandingan realisasi produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya



Dapat dilihat pada gambar 2.1 jumlah produksi perikanan tangkap pada 2 (dua) tahun terakhir mengalami sedikit penurunan, sedangkan pada jumlah produksi perikanan budidaya meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 akan tetapi realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sehingga terealisasi melebihi 2 (dua) tahun terakhir.

Jika dilihat perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4. Capaian Kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan s.d Jangka Menengah Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Awal RPJMD 2021	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022 %	Target 2026	Capaian s/d 2022 terhadap target 2026
1.	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	54.857,3	54.480,90	55.347,45	55.800,3	97,63%
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	49.428,9	57.168,00	49.665,87	64.843,6	77,77%

Pada indikator jumlah produksi perikanan tangkap jika dilihat capaian pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan target tahun 2022 telah tercapai sebesar 97,63%, pada tahun 2026 akan memenuhi target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada indikator jumlah produksi perikanan budidaya dengan target produksi tahun 2026 sebesar 64.843 ton capaian pada tahun 2022 sebesar 50.428 ton (77,7%).

Sumberdaya pendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan pada indikator jumlah produksi perikanan tangkap adalah anggaran APBD/APBN pada program pengelolaan perikanan tangkap. Sumberdaya pendukung kinerja tersebut dapat efektif dengan mengadakan kegiatan bimtek keterampilan nelayan, kegiatan pengawakan kapal perikanan dan perizinan. Kegiatan akan berhasil apabila ditunjang oleh adanya identifikasi kegiatan, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan serta adanya monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan pada indikator jumlah produksi perikanan tangkap antara lain sebagai berikut :

- a. Bantuan alat tangkap dan kapal
- b. Bimtek keterampilan nelayan

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan pada indikator jumlah produksi perikanan tangkap antara lain sebagai berikut :

- a. Ombak besar.
- b. Harga BBM mahal.
- c. Alat tangkap yang sudah tidak layak untuk digunakan untuk penangkapan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan selama tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

- a. Memberikan bantuan subsidi BBM kepada nelayan.

- b. Memberikan bantuan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan

Pada sasaran meningkatnya produksi perikanan ini untuk indikator jumlah produksi perikanan tangkap merupakan jumlah produksi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi baik tangkapan laut dan maupun perairan umum.

Sedangkan sumberdaya pendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan pada indikator jumlah produksi perikanan budidaya adalah sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, sumberdaya alam, dan ketersediaan anggaran. Sumberdaya pendukung kinerja tersebut dapat efektif dengan mengadakan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, penyediaan sarana dan prasarana pembudidaya ikan yang efektif, dan penggunaan anggaran yang efisien.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan pada indikator jumlah produksi perikanan budidaya antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya bantuan pemerintah
- b. Tingginya permintaan pasar
- c. Mudahnya akses informasi teknologi perikanan budidaya

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan pada indikator jumlah produksi perikanan tangkap antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatnya harga pakan
- b. Alih fungsi lahan

Alternatif solusi yang telah dilakukan selama tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan pelatihan pembuatan pakan ikan mandiri
- b. Pembinaan dan pengembangan kelembagaab pembudidaya ikan
- c. Pemberian bantuan benih dan pakan ikan serta sarana dan prasarana pembudidaya ikan

Pada sasaran meningkatnya produksi perikanan ini untuk indikator jumlah produksi perikanan budidaya merupakan jumlah produksi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi baik pembudidayaan jaring apung tawar, jaring tancap tawar, karamba, kolam air deras, kolam air tenang, minapadi dan tambak sederhana.

Sasaran #2 Meningkatnya Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Sasaran ini dicapai memiliki 4 (empat) indikator sasaran yaitu: (1) Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K; (2) Kawasan konservasi yang

dikelola secara berkelanjutan (ha); (3) Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan; (4) Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan. Indikator pertama yaitu Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K dan indikator kedua yaitu Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) dicapai melalui program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar Minyak dan Gas Bumi
 Sedangkan indikator ketiga yaitu Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan dan indikator keempat yaitu Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan dicapai melalui program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :
 - Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil
 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Capaian Realisasi Kinerja Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan Tahun 2022

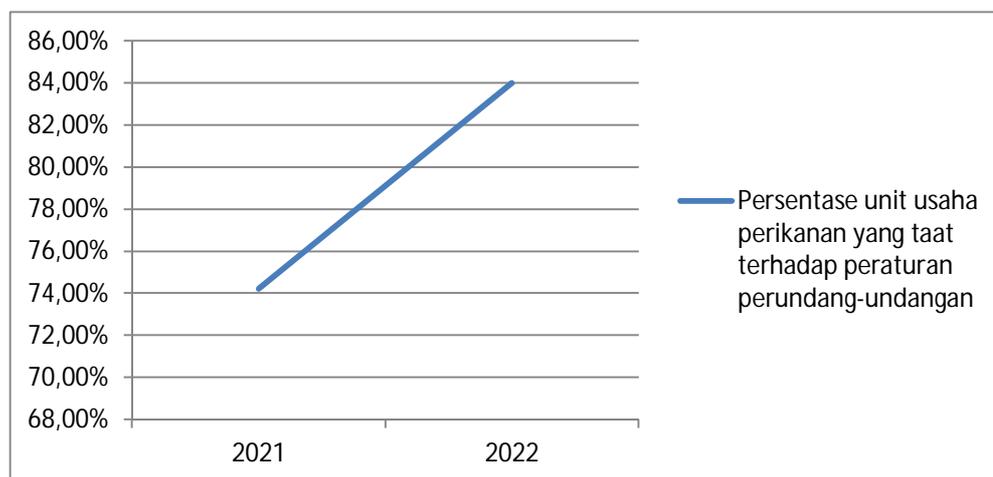
No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K	2 izin	0	0,00%
		Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	10.687,49	0	0,00%
		Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	60%	84%	140%
		Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	50%	50%	100%

Indikator pertama yaitu Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K dengan target indikator di tahun 2022 sebanyak 2 izin terealisasi sebanyak 0 izin dengan capaian sebesar 0,00%. Hal ini dikarenakan lahirnya UU no.11/2020 bahwa RZWP3K diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 28/2021 Pasal 139 (1) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan persetujuan di Perairan Pesisir kepada Gubernur sepanjang RZWP3K telah integrasi dengan RTRWP. Target pada

indikator sasaran ini akan diajukan perubahan dari 2 izin menjadi 2 rekomendasi pada perubahan Renstra. Indikator kedua yaitu Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) dengan target indikator sebesar 10.687,49 Ha terealisasi sebesar 0 Ha dengan capaian sebesar 0,00%. Hal ini disebabkan tidak adanya anggaran yang secara khusus diperuntukkan merealisasikan kegiatan. Indikator ketiga yaitu Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan dengan target di tahun 2022 sebesar 60% terealisasi sebesar 84% dengan capaian sebesar 140%, meningkat terhadap persentase tingkat kepatuhan berdasarkan data pelaku usaha perikanan dari 11 Kabupaten/Kota. Dan indikator keempat yaitu Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan dengan target di tahun 2022 sebesar 50% terealisasi sebesar 50% dengan capaian 100%, tetap sama dengan target tahun sebelumnya karena keterbatasan anggaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa capaian rata-rata untuk sasaran Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan adalah sebesar 60,00%.

Untuk keempat indikator pada sasaran ini pada tahun-tahun sebelumnya belum ditargetkan sehingga tidak dapat membandingkan capaian. Pada indikator persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan dapat dibandingkan realisasi dengan tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya perbandingan realisasi persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut :

Gambar 2.2 Perbandingan realisasi persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan



Dapat dilihat pada gambar 2.2 persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan pada 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Jika dilihat perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6. Capaian Kinerja sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan s.d Jangka Menengah Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Awal RPJMD 2021	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022 %	Target 2026	Capaian s/d 2022 terhadap target 2026
2.	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K	-	2 izin	0,00	2 Rekom	0,00%
		Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	-	10.687,49	0,00	39.143,44	0,00%
		Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	74,21%	60%	140,00	77%	109,09%
		Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	-	50%	100,00	50%	100,00%

Pada indikator Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K jika dilihat capaian pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan target tahun 2022 telah tercapai sebesar 0,00% pada tahun 2026 akan tercapai target yang telah ditetapkan apabila target sudah berubah menjadi 2 rekomendasi dan proses integrasi RZWP3K dengan RTRW terlaksana dan ditetapkannya Perda RTRW. Pada indikator Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) jika dibandingkan dengan target 2022, target pada tahun 2026 akan tercapai apabila adanya ketersediaan anggaran. Pada indikator Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan capaian di tahun 2022 jika dibandingkan dengan target tahun 2026 telah tercapai sebesar 109,09%. Meningkatnya pelaku usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan karena sudah terlaksananya pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan. Dan pada indikator Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan capaian di tahun 2022 jika dibandingkan terhadap target di tahun 2026 adalah sebesar 100%. Hal ini dikarenakan adanya penambahan jumlah PPNS, Pengawas perikanan dan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Sumberdaya pendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan pada indikator pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun

pengusaha sesuai Perda RZWP3K adalah sumberdaya manusia, yang akan efektif jika adanya peningkatan sumberdaya manusia di bidang GIS. Sumberdaya pendukung pencapaian kinerja pada indikator kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) adalah adanya kepastian hukum Kawasan Konservasi Perairan Daratan (KKPD) yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Sumberdaya pendukung pencapaian kinerja pada indikator persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan adalah ketersediaan anggaran APBD/APBN, kapal pengawas, PPNS, pengawas perikanan dan staf pengawasan serta keterlibatan aparat terkait dari dinas Kabupaten/Kota. Kegiatan Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan menjadi efektif jika didukung oleh pendukung kinerja yang saling bekerjasama. Dan sumberdaya pendukung pada indikator persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan adalah anggaran APBD/APBN, PPNS, pengawas perikanan dan staf pengawasan. Kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan menjadi efektif jika didukung oleh sumberdaya pendukung kinerja yang saling bekerja sama.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan pada indikator pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K antara lain integrasi RTRW dengan RZWP3K yang sedang dalam proses. Pada indikator kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) antara lain perlunya pendanaan yang cukup agar kegiatan dapat terlaksana. Pada indikator persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan antara lain adanya kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS). Pada indikator persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan antara lain memperbanyak sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan pada indikator pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K antara lain sebagai berikut:

- a. Lahirnya UU no 11 / 2020 bahwa RZWP3K diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 28/2021 Pasal 139 (1) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan persetujuan di Perairan Pesisir kepada Gubernur sepanjang RZWP3K telah integrasi dengan RTRWP

Pada indikator kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) antara lain belum tersedianya anggaran. Pada indikator persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

- a. Sarana prasarana pengawasan yang kurang memadai
- b. Kurangnya anggaran yang tersedia

Pada indikator persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan antara lain adalah tidak adanya PPNS di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan pada sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan selama tahun 2022 antara lain pada indikator pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K adalah proses integrasi RZWP3K dengan RTRW segera terlaksana dengan ditetapkannya Perda RTRW. Pada indikator kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) antara lain ketersediaan anggaran. Pada indikator persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan antara lain dengan adanya penambahan personil pengawas, PPNS dan pengadaan sarana prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Pada indikator persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan antara lain adalah penambahan jumlah PPNS di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Sasaran #3 Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Perikanan

Sasaran ini dicapai melalui program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, dan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7. Capaian Realisasi Kinerja Meningkatnya Pelaku Usaha Perikanan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Meningkatnya pelaku usaha perikanan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	27.615	30.303	109,73%

Sasaran meningkatnya pelaku usaha perikanan dengan indikator jumlah pelaku usaha perikanan, di tahun 2022 terealisasikan sebanyak 30.303 RTP dari target 27.615 RTP dengan persentase capaian sebesar 109,73%.

Jika dilihat perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8. Capaian Kinerja Meningkatnya Pelaku Usaha s.d Jangka Menengah Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Awal RPJMD 2021	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022 %	Target 2026	Capaian s/d 2022 terhadap target 2026
3.	Meningkatnya pelaku usaha perikanan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)		27.615	109,73	28.965	104,62%

Jika dilihat capaian pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan target tahun 2022 telah tercapai sebesar 104,62%, pada tahun 2026 akan memenuhi target yang telah ditetapkan.

Sumberdaya pendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pelaku usaha adalah anggaran APBD/APBN dan stakeholder terkait. Untuk meningkatkan efektifitas sumberdaya pendukung peningkatan pelaku usaha di bidang perikanan tangkap, perlu adanya kegiatan bimtek keterampilan nelayan, kegiatan pengawakan kapal dan perizinan. Sedangkan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan akan efektif jika sumberdaya pendukung kinerja solid dan saling bekerja sama dengan baik.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pelaku usaha perikanan antara lain di bidang pengolahan dan pemasaran yaitu adanya kepatuhan kelayakan usaha pengolahan dan pemasaran berdasarkan NIB dan / atau sertifikat SKP / GMP serta adanya ragam inovasi produk olahan guna peningkatan mutu dan keamanan pangan dalam peningkatan pelaku usaha perikanan..

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pelaku usaha perikanan antara lain di bidang perikanan tangkap adalah adanya penurunan hasil tangkapan karena adanya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), bahan bakar yang mahal, dan kebanyakan nelayan menangkap ikan skala kecil sehingga tidak memenuhi pencapaian target penangkapan

Alternatif solusi yang telah dilakukan selama tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

- a. Memberikan bimtek keterampilan nelayan
- b. Memberi bantuan kepada nelayan
- c. Memberikan bantuan subsidi BBM berupa uang kepada nelayan
- d. Terus menggalakkan sosialisasi/kampanye GEMARIKAN ke daerah
- e. Pelatihan/bimtek/demo pengolahan guna peningkatan skill pengolahan dan pemasaran ikan
- f. Peningkatan mutu dan keamanan pangan dalam konsumsi ikan

Sasaran #4 Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan

Sasaran ini dicapai melalui program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
- Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9. Capaian Realisasi Kinerja Meningkatnya angka konsumsi ikan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
4.	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	40,60	40,20	99,01%

Indikator target Angka Konsumsi Ikan (AKI) di tahun 2022 sebesar 40,6 kg/kapita/tahun, capaian AKI 2022 masih berdasarkan angka capaian 2021 yaitu 40,2 kg/kapita/tahun dikarenakan baru akan dirilis oleh BPS pada tahun 2023 ini, sehingga berdasarkan capaian tersebut sudah hampir memenuhi target yakni 99,01%.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

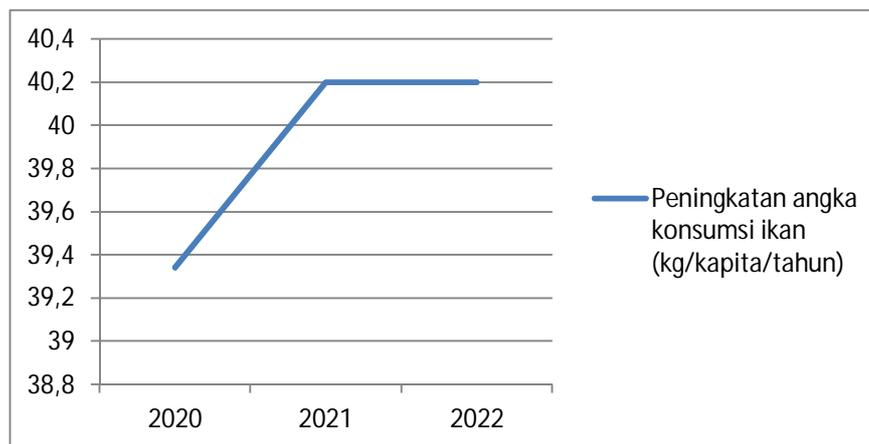
Tabel 2.10. Realisasi Kinerja pencapaian sasaran Meningkatnya Angka konsumsi ikan Tahun 2022 serta Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Realisasi		Realisasi		
			2020	2021	Target	Realisasi*	% capaian
4	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	39,34	40,20	40,60	40,20	99,01

*Realisasi sementara

Untuk indikator pada sasaran ini pada tahun-tahun sebelumnya belum ditargetkan sehingga tidak dapat membandingkan capaian sehingga yang dibandingkan adalah realisasinya. Untuk lebih jelasnya perbandingan realisasi jumlah produksi perikanan tangkap dan jumlah produksi perikanan budidaya dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut :

Gambar 2.3 Perbandingan realisasi angka konsumsi ikan



Dapat dilihat pada gambar 2.3. angka konsumsi ikan pada 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan di tahun 2020-2021, sehingga dengan optimis di tahun 2022 juga akan terjadi peningkatan meskipun angka konsumsi ikan tahun 2022 belum rilis.

Jika dilihat perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11. Capaian Kinerja sasaran meningkatnya angka konsumsi ikan s.d Jangka Menengah Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Awal RPJMD 2021	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022 %	Target 2026	Capaian s/d 2022 terhadap target 2026
4.	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	40,20	40,60	99,01	42,50	94,59%

Dari target Angka Konsumsi Ikan (AKI) tahun 2026 sebesar 42,5 kg/kapita/tahun, dan capaian AKI 2022 yang masih berdasarkan angka capaian 2021 maka diprediksi capaian 2026 akan memenuhi (minimal mendekati) angka target AKI tahun 2026 dengan didukung anggaran yang memadai dan sumberdaya kinerja.

Sumberdaya pendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah anggaran APBD/APBN, Pembina mutu, analis pasar hasil perikanan, pengawas perikanan, jajaran pelaksana bidang pengawasan dan penguatan daya saing dan produk, dinas Kabupaten/Kota terkait serta instansi terkait lainnya. Kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan menjadi efektif apabila didukung oleh sumberdaya pendukung kinerja yang solid dan asling bekerja sama dengan baik.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini antara lain sebagai berikut :

- a. Minat masyarakat yang tinggi untuk mengkonsumsi ikan
- b. Ragam inovasi produk olahan guna peningkatan mutu dan keamanan pangan dalam peningkatan angka konsumsi ikan

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini antara lain rendahnya minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan selama tahun 2022 antara lain terus menggalakkan sosialisasi/kampanye GEMARIKAN ke daerah serta pelatihan/bimtek/demo pengolahan guna peningkatan skill pengolahan dan pemasaran ikan serta peningkatan mutu dan keamanan pangan dalam upaya peningkatan konsumsi ikan.

Sasaran #5 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran ini dicapai melalui program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12. Capaian Realisasi Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	BB Indeks	BB Indeks	100,00%

h

Dilihat pada tabel diatas, untuk sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik telah tercapai 100%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja dan realisasi pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

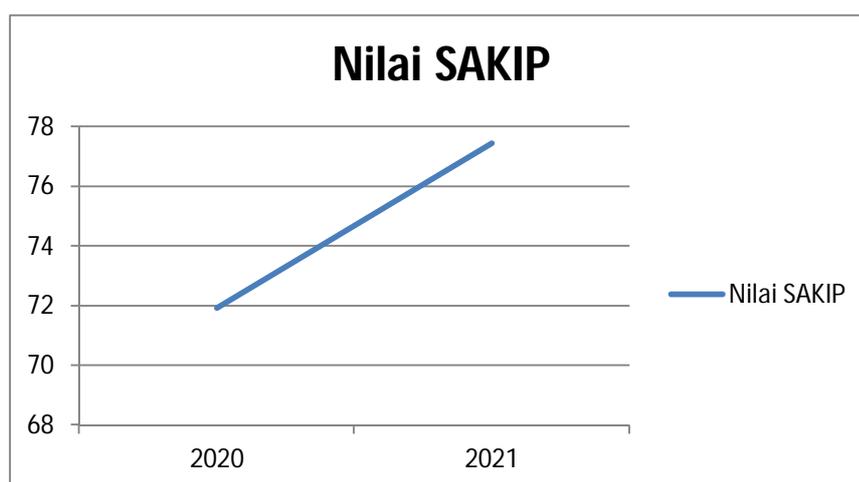
Tabel 2.13. Realisasi Kinerja pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2022 serta Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Capaian/ Realisasi		Capaian/ Realisasi		
			2020	2021	Target	Realisasi*	% capaian
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) / Nilai SAKIP	BB Indeks 71,92	BB Indeks 75,76	BB Indeks	BB Indeks	100

*Realisasi sementara

Untuk indikator pada sasaran ini lebih jelasnya dapat dilihat perbandingan realisasinya pada gambar 2.4. berikut :

Gambar 2.4. Perbandingan realisasi Nilai SAKIP tahun 2020-2021



Dapat dilihat pada Gambar 2.4. Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Jika dilihat perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14. Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik s.d Jangka Menengah Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Awal RPJMD 2021	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022 %	Target 2026	Capaian s/d 2022 terhadap target 2026
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	BB Indeks	BB Indeks	100,00	AA Indeks	-

Berdasarkan tabel 2.14. capaian Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2022 jika dibandingkan dengan target di tahun 2026 yaitu AA Indeks maka kemungkinan akan tercapai. Sumberdaya pendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah sumberdaya manusia dalam menyusun perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang baik.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini antara lain adalah konsistensi dalam melakukan koordinasi dengan unit kerja baik di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Dinas Kabupaten/Kota, dan Instansi Pemerintah di Pemerintahan Provinsi Jambi.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini antara lain kurangnya anggaran untuk melakukan koordinasi. Alternatif solusi yang telah dilakukan selama tahun 2022 antara lain melakukan Rakortekrenbang.

Tabel 2.15. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-							
		Tahun 2021 (Tahun Transisi)	2022	2023	2024	2025	2026	Tahun 2021 (Tahun Transisi)	2022	2023	2024	2025	2026	Tahun 2021 (Tahun Transisi)	2022	2023	2024	2025	2026
1	2																		
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	70.000	54.480,9	54.807,8	55.136,7	55.467,5	55.800,3	54.989,5	54.478,00*	54.807,8	55.136,7	55.467,5	55.800,3	78,55	99,99	100	100	100	100
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	72.264	57.168,0	58.997,0	60.885,0	62.833,0	64.843,6	49.428,9	50.428,00*	58.997,0	60.885,0	62.833,0	64.843,6	68,40	88,25	100	100	100	100
3	Pengelolaan Ruang Laut oleh Masyarakat Pesisir atau Pengusaha sesuai Perda RZWP3K (Izin)	-	2 Izin	-	0*	2 Izin	2 Izin	2 Izin	2 Izin	-	0	100	100	100	100				
4	Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (Ha)	-	10.687,49	16.400,53	27.613,89	33.447,08	39.143,44	-	0	16.400,53	27.613,89	33.447,08	39.143,44	-	0	100	100	100	100
5	Persentase Unit Usaha Perikanan yang Taat terhadap Peraturan Perundang-Undangan (Persen)	-	60%	65%	70%	75%	77%	-	84*	65%	70%	75%	77%	-	140	100	100	100	100
6	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan (Persen)	-	50%	50%	50%	50%	50%	-	50*	50%	50%	50%	50%	-	100	100	100	100	100
7	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	-	27.615	27.947	28.282	28.622	28.965	-	29.774*	27.947	28.282	28.622	28.965	-	107,82	100	100	100	100
8	Nilai Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kpl/Thn)	39,00	40,60	41,00	41,60	42,00	42,50	39,50	40,20*	41,00	41,60	42,00	42,50	101,29	99,01	100	100	100	100
9	Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Indeks)	BB Indeks	BB Indeks	A Indeks	A Indeks	AA Indeks	AA Indeks	BB Indeks	BB Indeks*	A Indeks	A Indeks	AA Indeks	AA Indeks	100	100	100	100	100	100

Keterangan :

* Angka Sementara

Angka Prediksi

Tabel 2.16.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan dan
Pencapaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan s/d Tahun 2023
Provinsi Jambi

NO	Kode	Ususan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Target renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi capaian kinerja renstra SKPD s.d RENJA SKPD tahun 2021		Target kinerja dan anggaran RENJA SKPD tahun 2022		Realisasi kinerja pada triwulan								Realisasi capaian kinerja dan anggaran RENJA SKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renja SKPD 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2022		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renstra SKPD s.d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD penanggung jawab	
										I (Jan s/d Maret)		II (April s/d Juni)		III (Juli s/d Sept)		IV (Okt s/d Des)											
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K
I	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP (indeks)	100	184,819,296,528			15.00	27,729,898,253	2.08	3,844,216,073	3.24	5,988,657,518	3	5,829,245,906	3	5,982,844,394	12	21,644,963,891	78.06	78.06	11.71	21,644,963,891	78.06	11.71	DKP	
	3.25.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan kinerja dinas kelautan dan perikanan (Laporan)	2	5,715,640,252			0.29	815,000,000	0.02	58,472,200	0.05	144,514,984	0	74,850,205	0	139,892,307	0	417,729,696	51.26	51.26	0.15	417,729,696	2,562.76	7.31	DKP	
	3.25.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	2	1,502,314,240			0.29	220,000,000	0.04	26,532,200	0.04	30,628,251	0	11,492,400	0	55,611,092	0	124,263,943	56.48	56.48	0.17	124,263,943	2,824.18	8.27	DKP	
	3.25.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	358,122,720			0	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP
	3.25.01.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	10	1,082,567,756			1.39	150,000,000	0.09	9,600,000	0.30	32,361,220	0	23,148,505	0	32,161,615	1	97,271,340	64.85	64.85	0.90	97,271,340	648.48	8.99	DKP	

3.25.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Laporan)	1	2,400,000,000	0.17	400,000,000	0.01	22,340,000	0.03	81,525,513	0	40,209,300	0	52,119,600	0	196,194,413	49.05	49.05	0.08	196,194,413	4,904.86	8.17	DKP
3.25.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelola administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Bulan)	12	144,026,256,046	1.71	20,552,398,253	0.30	3,540,939,808	0.44	5,326,695,909	0	5,325,377,723	0	5,071,273,236	2	19,264,286,676	93.73	93.73	1.61	19,264,286,676	781.10	13.38	DKP
3.25.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	160	140,791,633,346	22.81	20,072,398,253	3.96	3,487,979,808	5.95	5,235,178,409	6	5,245,568,123	6	4,964,860,436	22	18,933,586,776	94.33	94.33	21.52	18,933,586,776	58.95	13.45	DKP
3.25.01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)	1	3,234,622,700	0.15	480,000,000	0.02	52,960,000	0.03	91,517,500	0	79,809,600	0	106,412,800	0	330,699,900	68.90	68.90	0.10	330,699,900	6,889.58	10.22	DKP
3.25.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan (%)	100	1,188,030,600	16.83	200,000,000	0.76	9,000,000	1.83	21,703,200	2	19,059,600	4	46,556,011	8	96,318,811	48.16	48.16	8.11	96,318,811	48.16	8.11	DKP
3.25.01.1.03.01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD (Dokumen)	1	288,607,500	0.17	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP
3.25.01.1.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (Laporan)	2	899,423,100	0.33	150,000,000	0.02	9,000,000	0.05	21,703,200	0	19,059,600	0	46,556,011	0	96,318,811	64.21	64.21	0.21	96,318,811	3,210.63	10.71	DKP
3.25.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepagawain Perangkat Daerah	Terlaksananya Disiplin ASN Dinas Kelautan dan Perikanan (Tahun)	1	2,334,519,956	0.21	500,000,000	0.01	18,496,000	0.02	40,953,556	0	21,987,300	0	84,490,180	0	165,927,036	33.19	33.19	0.07	165,927,036	3,318.54	7.11	DKP
3.25.01.1.05.02	Sub Kegiatan Pakaian Dinas beserta Atributnya kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (Paket)	1,625	1,250,000,000	325.00	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP
3.25.01.1.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	100	542,000,000	18.45	100,000,000	-	2.20	11,950,000	-	-	9	46,757,080	11	58,707,080	58.71	58.71	10.83	58,707,080	58.71	10.83	DKP	
3.25.01.1.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (Orang)	200	1,042,519,956	28.78	150,000,000	3.55	18,496,000	5.56	29,003,556	4	21,987,300	7	37,733,100	21	107,219,956	71.48	71.48	20.57	107,219,956	35.74	10.28	DKP

3.25.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi umum pada dinas kelautan dan perikanan (Bulan)	12	5,986,219,114			2.09	1,042,500,000	0.16	79,009,097	0.28	139,570,807	0	105,293,667	0	135,516,786	1	459,390,357	44.07	44.07	0.92	459,390,357	367.22	7.67	DKP
3.25.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	15	77,270,000			1.94	10,000,000	0.61	3,155,000	0.61	3,130,000	-	-	1	3,715,000	2	10,000,000	100.00	100.00	1.94	10,000,000	666.67	12.94	DKP
3.25.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	25	1,675,950,374			4.48	300,000,000	0.36	24,400,700	0.36	23,821,650	0	25,100,900	0	24,588,900	1	97,912,150	32.64	32.64	1.46	97,912,150	130.55	5.84	DKP
3.25.01.1.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Perabotan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (Paket)	5	250,000,000			1.00	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP
3.25.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	10	274,995,000			1.82	50,000,000	0.13	3,540,000	0.13	3,491,000	0	7,521,000	0	2,399,000	1	16,951,000	33.90	33.90	0.62	16,951,000	339.02	6.16	DKP
3.25.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (Paket)	10	437,992,500			1.71	75,000,000	0.10	4,582,500	0.58	25,373,000	0	5,770,000	0	4,262,500	1	39,988,000	53.32	53.32	0.91	39,988,000	533.17	9.13	DKP
3.25.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	1	39,498,500			0.19	7,500,000	0.03	1,249,500	0.03	1,249,500	0	1,249,500	0	1,249,500	0	4,998,000	66.64	66.64	0.13	4,998,000	6,664.00	12.65	DKP
3.25.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	12	2,399,998,800			2.00	400,000,000	0.21	42,081,397	0.41	82,505,657	0	65,652,267	0	99,301,886	1	289,541,207	72.39	72.39	1.45	289,541,207	603.21	12.06	DKP
3.25.01.1.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	830,513,940			0.18	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP
3.25.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terkelolanya administrasi umum pada dinas kelautan dan perikanan (Bulan)	12	14,803,491,094			2.24	2,765,000,000	-	-	0.02	22,862,500	0	26,079,463	-	-	0	48,941,963	1.77	1.77	0.04	48,941,963	14.75	0.33	DKP

	3.25.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	59	2,970,337,120		9.93	500,000,000	0.34	17,035,799	2.94	148,008,000	2	113,939,610	3	142,012,754	8	420,996,163	84.20	84.20	8.36	420,996,163	142.71	14.17	DKP
	3.25.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	4	559,753,280		0.71	100,000,000	-	-	0.07	9,976,140	-	-	1	94,120,500	1	104,096,640	104.10	104.10	0.74	104,096,640	2,602.42	18.60	DKP
	3.25.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	15	2,797,464,566		2.68	500,000,000	-	-	-	-	-	-	1	131,993,000	1	131,993,000	26.40	26.40	0.71	131,993,000	175.99	4.72	DKP
	3.25.01.1.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	20	519,994,500		3.85	100,000,000	0.07	1,920,000	0.44	11,480,000	0	7,907,200	-	-	1	21,307,200	21.31	21.31	0.82	21,307,200	106.54	4.10	DKP
II	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Pengelolaan Ruang laut oleh Masyarakat Pesisir maupun Pengusaha sesuai Perda RZWP3K (izin)	10	19,689,500,000		1.30	2,564,500,000	0.07	131,268,000	0.24	465,554,559	0	231,277,544	0	490,537,375	1	1,318,637,478	51.42	51.42	0.67	1,318,637,478	514.19	6.70	DKP
	3.25.02.1.01	<i>Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</i>	Persentase wilayah perairan yang dikelola berdasarkan RZWP3K (%)	90	16,610,000,000		11.60	2,140,000,000	0.71	131,268,000	2.52	465,554,559	1	231,277,544	3	490,537,375	7	1,318,637,478	61.62	61.62	7.14	1,318,637,478	68.47	7.94	DKP
	3.25.02.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen materi teknis muatan peraturan pesisir pada RTRW provinsi/dokumen final RZWP3K (Dokumen)	1	4,010,000,000		0.11	430,000,000	0.01	45,829,000	0.02	92,670,100	0	60,171,500	0	114,478,344	0	313,148,944	72.83	72.83	0.08	313,148,944	7,282.53	7.81	DKP
	3.25.02.1.01.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola (Ha)	39,143.44	5,190,000,000		5.732	760,000,000	644	85,439,000	2,812.33	372,884,459	1,290	171,106,044	2,836	376,059,031	7,583.3	1,005,488,534	132.30	132.30	7,583.48	1,005,488,534	0.34	19.37	DKP

3.25.03.1.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan yang tersedia di wilayah laut sampai dengan 12 mil (Dokumen)	1	1,000,000,000	0.16	160,000,000	-	-	0.03	25,709,500	0	2,003,500	0	11,356,000	0	39,069,000	24.42	24.42	0.04	39,069,000	2,441.81	3.91	DKP
3.25.03.1.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sampai dengan 12 mil (Unit)	12,500	16,790,000,000	2,121.80	2,850,000,000	41.20	55,340,000	62.77	84,319,000	62	83,795,400	4,001	5,373,802,800	4,167	5,597,257,200	196.39	196.39	4,167.11	5,597,257,200	1.57	33.34	DKP
3.25.03.1.01.03	Sub Kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sampai dengan 12 mil (Unit)	75	700,000,000	12.86	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP
3.25.03.1.02	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap di PUD (Ton)	6,775.0	8,375,290,000	1,308.78	1,617,920,000	4.29	5,300,000	8.36	10,338,600	8	10,292,400	284	351,346,400	305	377,277,400	23.32	23.32	305.19	377,277,400	0.34	4.50	DKP
3.25.03.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan yang tersedia di wilayah perairan darat (Dokumen)	1	2,625,290,000	0.27	717,920,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP
3.25.03.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah perairan darat (Unit)	1,750	5,050,000,000	270.30	780,000,000	1.84	5,300,000	3.58	10,338,600	4	10,292,400	122	351,346,400	131	377,277,400	48.37	48.37	130.74	377,277,400	2.76	7.47	DKP
3.25.03.1.02.03	Sub Kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah perairan darat (Unit)	25	700,000,000	4.29	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP
3.25.03.1.03	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Meningkatnya izin kapal perikanan tangkap berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT (izin)	170	2,605,000,000	32.63	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP

3.25.04.1.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah data dan informasi usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan di laut berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko (Dokumen)	5	170,000,000	1	20,000,000	-	-	0.59	20,000,000	-	-	-	-	1	20,000,000	100.00	100.00	0.59	20,000,000	2,000.00	11.76	DKP
3.25.04.1.02	Kegiatan Penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya di laut sampai dengan 12 ml serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing	Meningkatnya izin usaha pembudidayaan ikan di laut (izin)	5	300,000,000	0.67	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP
3.25.04.1.02.01	Sub Kegiatan Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	Jumlah rekomendasi persyaratan dan prosedur penerbitan perizinan berusaha bidang pembudidayaan ikan yang diterbitkan (Rekomendasi)	5	175,000,000	0.71	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP
3.25.04.1.02.02	Sub Kegiatan Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha bidang pembudidayaan ikan yang diterbitkan (Rekomendasi)	5	125,000,000	0.60	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP
3.25.04.1.03	Kegiatan Penerbitan izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT yang beroperasi di wilayah administrasinya, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing	Tersedianya izin kapal pengangkut pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT (izin)	10	2,350,000,000	1.32	310,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP
3.25.04.1.03.01	Sub Kegiatan Penetapan persyaratan dan prosedur izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah rekomendasi persyaratan dan prosedur izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan yang menjadi kewenangan provinsi yang diterbitkan (Rekomendasi)	5	900,000,000		110,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP

3.25.04.1.05.03	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota (Unit)	500	28,770,000,000	87.42	5,030,000,000	1.10	63,380,000	3.86	222,104,197	3	174,509,300	27	1,559,609,705	35	2,019,603,202	40.15	40.15	35.10	2,019,603,202	8.03	7.02	DKP
3.25.04.1.05.04	Sub Kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan di laut	Jumlah sarana pembudidayaan ikan di laut (Unit)	20	500,000,000	4.00	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP
3.25.04.1.05.05	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota (Unit)	30	2,865,500,000	5.79	553,000,000	0.26	24,380,000	0.48	45,397,800	0	39,361,200	2	196,277,510	3	305,416,510	55.23	55.23	3.20	305,416,510	184.10	10.66	DKP
3.25.04.1.05.06	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan yang teruji sehat (Dokumen)	2	2,950,000,000	0.30	445,000,000	0.02	28,312,700	0.05	73,927,250	0	56,755,400	0	72,777,700	0	231,773,050	52.08	52.08	0.16	231,773,050	2,604.19	7.86	DKP
3.25.04.1.05.07	Sub Kegiatan Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di laut dan kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi	Jumlah pembudidaya (Orang)	300	400,000,000	52.50	70,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP
3.25.04.1.05.08	Sub Kegiatan Pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Luas lahan untuk pembudidayaan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang ditetapkan untuk dikembangkan, dimanfaatkan, dan dilindungi (Ha)	20	550,000,000	4.00	110,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP

	3.25.05.1.02.01	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya (Dokumen)	15	1,739,200,000		2.48	288,000,000	0.14	16,048,000	-		1	65,172,800	0	36,778,400	1	117,999,200	40.97	40.97	1.02	117,999,200	273.15	6.78	DKP
	3.25.05.1.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya (Dokumen)	5	619,000,000		0.80	99,000,000	-		-		-						0.00	0.00	-				DKP
	3.25.05.1.02.03	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha pemasaran hasil pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi (Dokumen)	5	474,000,000		0.78	74,000,000	-		-		-								-				DKP
VI	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan angka konsumsi ikan (Kg/Kapita/Tahun)	42.50	26,540,252,580		9.22	5,759,100,000	0.26	161,641,500	0.58	364,397,000	1	324,868,849	1	743,083,086	3	1,593,990,435	27.68	27.68	2.55	1,593,990,435	65.12	6.01	DKP
	3.25.06.1.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbitnya jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan (izin)	20	14,203,800,000		3.37	2,391,000,000	0.15	106,976,500	0.22	157,804,100	0	196,358,200	0	340,553,986	1	801,692,786	33.53	33.53	1.13	801,692,786	167.65	5.64	DKP
	3.25.06.1.01.01	Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi (Rekomendasi)	15	2,839,000,000		2.44	461,000,000	-		0.05	9,903,900	0	9,743,900	0	28,142,100	0	47,789,900	10.37	10.37	0.25	47,789,900	69.11	1.68	DKP

3.25.06.1.03	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Dokumen)	1	4,625,000,000	0.18	835,000,000	0.00	14,080,000	0.02	81,044,000	0	25,995,600	0	300,424,800	0	421,544,400	50.48	50.48	0.09	421,544,400	5,048.44	9.11	DKP
3.25.06.1.03.01	Sub Kegiatan Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen hasil pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/distribusi ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi (Dokumen)	1	325,000,000	0.20	65,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP
3.25.06.1.03.02	Sub Kegiatan Pemberian Insentif dan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diberikan insentif dan fasilitas (Unit Usaha)	50	2,485,000,000	9.46	470,000,000	0.18	9,000,000	1.01	50,171,000	1	25,995,600	6	300,114,800	8	385,281,400	81.97	81.97	7.75	385,281,400	163.95	15.50	DKP
3.25.06.1.03.03	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah data dan informasi yang diintegrasikan ke dalam sistem informasi manajemen logistik ikan dan terkoneksi dari hulu sampai hilir (Dokumen)	1	1,815,000,000	0.17	300,000,000	0.00	5,080,000	0.02	30,873,000	-	-	0	310,000	0	36,263,000	12.09	12.09	0.02	36,263,000	1,208.77	2.00	DKP

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Sehubungan dengan kinerja pelayanan pemerintah daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di dalam pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Mengingat urusan kelautan dan perikanan merupakan urusan pilihan yang tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi kegiatan bidang perikanan. Namun demikian perlu kiranya ada suatu standar yang formal dalam pelayanan terhadap masyarakat pada umumnya sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja pelayanan organisasi.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dilihat dari capaian kinerja sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagaimana tertera pada tabel 2.17. sebagai berikut :

Tabel 2.17. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2021)	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi s/d 2021	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Keterangan
1.	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	54.857,3	55.800,3	54.857,3	54.480,90	55.347,45	101,59%	
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	49.428,9	64.843,6	49.428,9	57.168,00	49.665,87	86,88%	
2.	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K (Izin)	2	2	0	2	0	0,00%	Tidak tercapai dikarenakan Dengan adanya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja & PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Permen KP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, bahwa persetujuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) harus mendapat persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan dan sampai saat ini seluruh persetujuan KKPRL merupakan kewenangan Pemerintah Pusat
		Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	0	39.143,44	0	10.687,49	0	0,00%	Belum tersedianya anggaran
		Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	60	74,21	79,8	60%	84%	140%	
		Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	50	50	50	50%	50%	100%	
3.	Meningkatnya pelaku usaha perikanan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	0	28.965	0	27.615	30.303	109,73%	
4.	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	40,20	42,50	40,20	40,60	40,80	100,49%	
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	BB Indeks	AA Indeks	BB Indeks	BB Indeks	BB Indeks	100,00%	

Dilihat dari table diatas, kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Pada tahun 2022, indikator sasaran tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan dari total indikator dengan rata-rata persentase capaian sasaran sebesar 92,57%.

Secara umum dalam menjalankan program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan pasti terdapat kendala/hambatan yang dihadapi. Beberapa kendala/hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang perikanan dan kelautan. Hambatan dan kendala yang dihadapi tersebut antara lain :

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi**

Tidak ada permasalahan yang menjadi kendala dalam penyerapan anggaran dari Program yang dimiliki dalam bidang secretariat

➤ **Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil**

Permasalahan utama dalam menjalankan program ini adalah terbitnya UU No.11/2020 bahwa RZWP3K diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 28/2021 Pasal 139 (1) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan persetujuan di Perairan Pesisir kepada Gubernur sepanjang RZWP3K telah integrasi dengan RTRWP. dan sedangkan untuk kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya anggaran yang secara khusus diperuntukkan merealisasikan kegiatan.

Adapun solusi yang mungkin bisa dilakukan sebagai tindak lanjut dalam meanggulangi permasalahan tersebut adalah merubah satuan dari izin menjadi rekomendasi seraya menunggu peraturan turunan dari UU No. 11/2020 dan mengalokasikan anggaran pada tahun berjalan maupun tahun yang akan datang dalam upaya mewujudkan kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan di Provinsi Jambi.

➤ **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, yaitu Pemilikan sarana penangkapan ikan nelayan hampir 80 % sarana penangkapan ikan tradisional dengan ukuran kapal < 5 GT. Solusinya yaitu dengan memaksimalkan bantuan kapal > 30 GT dari pemerintah pusat sehingga wilayah tangkapan nelayan dapat menjangkau daerah yang lebih luas.

Selain itu, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah masih adanya pelanggaran penggunaan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik yang tidak ramah lingkungan di wilayah perairan Provinsi Jambi. Solusinya yaitu dengan secara bertahap membina dan mensosialisasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 2 tahun 2015 tentang "Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia" kepada para nelayan, serta secara berangsur-angsur mengganti alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tersebut dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Namun, jikalau nelayan atau pelaku pelanggaran penangkapan ikan masih terindikasi menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tersebut, maka akan ditindak tegas sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Adapun solusi yang mungkin bisa dilakukan sebagai tindak lanjut dalam meanggulangi permasalahan tersebut adalah :

- 1). Perlu diadakannya kajian mendalam tentang potensi ikan di daerah pantai, sehingga kedepan dalam pengambilan kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan tepat sasaran, terutama masalah penggunaan kapal penangkap ikan;
- 2). Merevitalisasi Alat Tangkap Penangkap Ikan yang dianjurkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 3). Berinovasi dalam pemilihan alat tangkap sesuai dengan daerah di Provinsi Jambi;
- 4). Pelatihan teknologi penangkapan ikan yang tepat guna dan tepat sasaran;
- 5). Pelatihan manajemen Koperasi/KUB yang baik dan berkelanjutan.

➤ **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Kendala yang dihadapi dalam mensukseskan program ini, yaitu makin menurunnya kondisi kualitas air, khususnya kualitas air di sungai yang biasa digunakan untuk membudidayakan ikan di keramba jaring apung (KJA). Solusinya adalah dengan melakukan pemantauan dan pemeriksaan kualitas air dengan cara berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (SKIPM) dan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam Jambi.

Adapun solusi yang mungkin bisa dilakukan sebagai tindak lanjut dalam meanggulangi permasalahan tersebut adalah :

- 1). Melakukan perekrutan ahli pembenihan ikan.
- 2). Pembentukan kelompok pembudidaya ikan dari pemula menjadi pembudidaya yang handal.
- 3). Maksimalkan pemberdayaan kepada UPR, masyarakat pembudidaya ikan skala kecil dengan memberikan pelatihan, sapras budidaya, dan lain lain, karena dengan diberdayakan UPR secara maksimal, maka dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan kebutuhan benih ikan dapat terpenuhi dalam daerah sendiri.
- 4). Pemberian bantuan benih ikan dan pakan yang berkualitas.

➤ **Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan**

Permasalahan utama dalam mensukseskan program ini yaitu masih maraknya penambangan emas tanpa izin (PETI) dan industri yang tidak bertanggungjawab yang dapat merusak lingkungan perairan, sehingga secara tidak langsung dapat menurunkan produksi tangkapan perairan umum solusinya yaitu dengan meningkatkan upaya bersama dari pihak terkait dalam sosialisasi dan penyuluhan tentang arti pentingnya menjaga kelestarian alam.

Selain itu, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan, sehingga masih ditemukan pelanggaran di bidang penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan merusak kelestarian sumber daya ikan, sehingga perlu meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, khususnya dengan mengembangkan dan meningkatkan lagi potensi masyarakat melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) serta edukasi atau sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perikanan.

➤ **Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Kendala yang dihadapi dalam mensukseskan program ini, mutu, kualitas, dan diversifikasi produk serta sertifikasi bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) masih belum maksimal sehingga masih belum bisa bersaing dan merebut pasar. Solusi atas kendala tersebut adalah dengan lebih meningkatkan mutu, kualitas, diversifikasi produk serta meningkatkan sertifikasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) atau Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.3.1. Hambatan dan Tantangan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, masih dijumpai adanya beberapa isu-isu strategi yang menjadi hambatan dan tantangan, yaitu :

2.3.1.1. Sekretariat

- Penempatan personil yang belum disesuaikan dengan kompetensi, keahlian dan latar belakang pendidikan;
- Pendelegasian wewenang yang belum jelas sesuai dengan TUPOKSI-nya, akan mengakibatkan pertanggung jawaban yang kurang memadai dan menimbulkan pelaksanaan kegiatan yang tumpang-tindih;
- Pembiayaan Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih terbatas.

2.3.1.2. Bidang Budidaya & Pengembangan Teknologi Perikanan

- Belum terpenuhinya benih ikan dalam daerah, sehingga sampai saat ini masih mendatangkan benih dari luar daerah;
- Kurang termotivasinya masyarakat dalam usaha budidaya ikan;
- Menurunnya daya dukung lahan /sumber air sebagai media budidaya, sehingga produksi ikan budidaya kurang optimal;
- Daya saing produk perikanan budidaya yang masih rendah, hal ini dikarenakan dalam pengelolaan pasca pemeliharaan hingga proses penanganan hasil produksi sebagian besar belum dilakukan secara CBIB;
- Masih minimnya pengetahuan pelaku usaha budidaya ikan dalam akses permodalan;
- Kualitas pembudidaya rata-rata masih rendah, dimana pekerjaan pembudidaya merupakan pekerjaan informal, sehingga pekerjaan ini bukan merupakan pekerjaan pokok.
- Masih kurangnya pemberdayaan/pelatihan budidaya ikan kepada masyarakat;
- Masih rendahnya pemberdayaan UPR, sehingga belum ada UPR baru yang terbentuk;
- Mahalnya harga pakan ikan yang ada di pasaran;
- Masih minimnya tenaga ahli yang kompeten di bidang budidaya.

2.3.1.3. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Tangkap

- Kapal penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagian besar masih menggunakan perahu tradisional dengan dayung dan atau motor kecil, sehingga penangkapan ikan masih terbatas di sekitar pantai;

- Sarana dan prasarana dermaga pendaratan ikan hasil tangkapan yang belum optimal, sehingga nelayan masih jarang yang mendaratkan hasil tangkapannya di PPI yang telah dibangun oleh pemerintah.
- Lembaga keuangan yang melayani kepentingan usaha rakyat (mitra usaha), baik perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank masih sangat terbatas;
- Masih minimnya kesadaran masyarakat nelayan akan kelestarian lingkungan;
- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat pesisir akan kewirausahaan dan kemandirian;
- Belum optimalnya penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan laut, sehingga berdampak pada rusaknya wilayah pesisir dan laut;
- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan kelestarian lingkungan pesisir dan laut;
- Belum optimalnya pemberdayaan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan.
- Masih sulitnya pengurusan izin usaha perikanan lebih dari 30 GT dari pusat;

2.3.1.4. Bidang Pengawasan & Penguatan Daya Saing Produk

- Belum optimalnya pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan, sehingga masih banyak pelanggaran terhadap pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- Masih minimnya pengetahuan SDM akan peraturan perundang-undangan tentang sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- Masih tingginya pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- Daya saing produk perikanan tangkap yang masih rendah, dimana produk perikanan tangkap masih kalah tenar dengan produk pangan lainnya, seperti daging sapi dan daging ayam;
- Masih kurangnya inovasi ragam olahan hasil perikanan, sehingga masih banyak dipasaran produk yang dijual masih dalam bentuk ikan hasil tangkapan;
- Sarana dan prasarana pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang belum memadai;
- Masih minimnya pengetahuan SDM packaging dan pengolahan hasil perikanan;
- Pemasaran hasil produksi, terutama komoditi hasil perikanan masih belum maksimal.

2.3.2. Kondisi yang Diinginkan

Untuk mewujudkan apa yang telah ditetapkan dalam program kerja dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, maka diharapkan dapat mampu mewujudkan hal-hal sebagai berikut :

2.3.2.1. Sekretariat

- Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam penanganan kewenangan;
- Sesuainya penempatan personil dengan kompetensi keahlian dan latar belakang pendidikan;

- Meningkatkan rasa tanggung jawab SDM sesuai dengan TUPOKSI, sehingga pelaksanaan program/kegiatan tidak umpang tindih dan monoton;
- Meningkatkan pelaporan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- Meningkatkan pendanaan dalam pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan.

2.3.2.2. Bidang Budidaya dan Pengembangan Teknologi Perikanan

- Meningkatkan pengetahuan SDM dalam bidang perikanan, khususnya di bidang perikanan budidaya, untuk tercapai sasaran yang diinginkan;
- Harus adanya pemberdayaan yang optimal untuk dalam produksi benih ikan secara mandiri;
- Harus adanya inovasi dalam mengembangkan produk hasil perikanan budidaya, berupa diversifikasi hasil olahan;
- Harus adanya kebijakan khusus dalam peningkatan akses modal untuk pembudidaya ikan;
- Perlu adanya peningkatan SDM pembudidaya ikan di kelembagaan kelompok untuk menjadi Kelompok Pembudidaya ikan mandiri;
- Adanya pelatihan kepada masyarakat pembudidaya ikan dalam membuat pakan sendiri, sehingga permasalahan mahalnnya pakan ikan bisa teratasi;
- Meningkatkan tenaga ahli yang kompeten di bidang budidaya;

2.3.2.3. Bidang Pengelolaan Ruang lajut dan Perikanan Tangkap

- Meningkatkan kapal penangkapan ikan yang dapat beroperasi dilepas pantai (Laut Natun dan Laut China Selatan);
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya akan pelestarian alam, sehingga permasalahan minimnya hasil tangkapan dapat teratasi;
- Perbaikan sarana dan prasarana dermaga pendaratan ikan (PPI) harus dilakukan, sehingga nelayan banyak yang mendaratkan hasil tangkapannya di dermaga yang telah dibangun oleh Pemerintah.
- Harus adanya inovasi dalam mengembangkan produk hasil perikanan tangkap, berupa diversifikasi hasil olahan;
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir akan kewirausahaan dan kemandirian;
- Meningkatkan lembaga keuangan yang melayani kepentingan usaha rakyat (mitra usaha) baik perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank, sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan mudal usaha;
- Tersusunnya rencana pengelolaan wilayah pesisir dan laut, sehingga kedepan arah kebijakan pembangunan pesisir dan laut tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain;

- Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan kelestarian lingkungan pesisir dan laut, sehingga masyarakat punya tanggung jawab akan lingkungannya;
- Meningkatkan pemberdayaan pada kelompok nelayan;
- Adanya kemudahan pengurusan izin usaha perikanan lebih dari 30 GT dari pusat, sehingga hasil produksi perikanan tangkap di Kabupaten Tanjung Jabung Barat meningkat;

2.3.2.4. Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing Produk

- Meningkatkan pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan, sehingga pelanggaran-pelanggaran terhadap pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan dapat ditekan;
- Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran dan pengolahan hasil Kelautan dan Perikanan yang memadai;
- Meningkatkan pengetahuan SDM akan packaging dan pengolahan hasil perikanan;
- Meningkatkan sarana dan prasarana pemasaran komoditi hasil perikanan.
- Meningkatkan pengetahuan SDM akan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam pengambilan kebijakan atau keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

2.4. Review Terhadap RKPD Tahun 2024

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Dengan melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Renja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi memiliki persamaan dengan RKPD Provinsi Jambi, dalam hal program dan kegiatan akan tetapi pagu indikatif tidak sesuai dengan RKPD Final, hal ini disebabkan antara lain :

1. Banyak usulan awal masyarakat yang tidak bisa diakomodasi dalam dokumen Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;
2. Menurunnya status tipologi Dinas, yang semula Dinas Perikanan bertipologi A, sejak tahun 2017 menjadi Tipe B;

3. Evaluasi program dan kegiatan prioritas oleh Tim TAPD, karena prioritas pembangunan Provinsi Jambi pada tahun 2024 memprioritaskan pembangunan infrastruktur Dasar, seperti jalan, jembatan dan Air bersih.

Review terhadap RKPD Tahun 2024 Provinsi Jambi dapat dilihat dalam Tabel 2.18.

Tabel 2.18. Review terhadap RKPD Tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

RKPD Awal Tahun 2024						Hasil Analisis Kebutuhan Rancangan Renja Awal Tahun 2022				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target	Pagu Indikatif	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI	Nilai SAKIP	A Indeks	32,415,101,886	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI	Nilai SAKIP	A Indeks	32,415,101,886	DKP	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Laporan	995,000,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Laporan	995,000,000		
	3.25.01.1.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	260,000,000	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	260,000,000		
	3.25.01.1.01.02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	65,000,000	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	65,000,000		
	3.25.01.1.01.06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD	10 Laporan	190,000,000	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD	10 Laporan	190,000,000		
	3.25.01.1.01.07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah buku statistik - Jumlah laporan monev pelaksanaan program kegiatan - Jumlah pertemuan pengumpulan data statistik - Jumlah pertemuan validasi statistik Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	480,000,000	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah buku statistik - Jumlah laporan monev pelaksanaan program kegiatan - Jumlah pertemuan pengumpulan data statistik - Jumlah pertemuan validasi statistik Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	480,000,000		
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelola administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	24,862,601,886	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelola administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	24,862,601,886		

	3.25.01.1.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/Bulan	24,287,601,886	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/Bulan	24,287,601,886		
	3.25.01.1.02.02	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	575,000,000	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	575,000,000		
	3.25.01.1.03	Administrtasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan keuangan	100%	200,000,000	Administrtasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan keuangan	100%	200,000,000		
	3.25.01.1.03.01	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50,000,000	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50,000,000		
	3.25.01.1.03.06	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	150,000,000	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	150,000,000		
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya disiplin ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	540,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya disiplin ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	540,000,000		
	3.25.01.1.05.02	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	325 Paket	250,000,000	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	325 Paket	250,000,000		
	3.25.01.1.05.09	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	100,000,000	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	100,000,000		
	3.25.01.1.05.10	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	190,000,000	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	190,000,000		
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Terkelolanya administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	1,047,500,000	Administrasi Umum Perangkat daerah	Terkelolanya administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	1,047,500,000		
	3.25.01.1.06.01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	15,000,000	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	15,000,000		
	3.25.01.1.06.02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah ATK - Pemakaian jasa kebersihan kantor			- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah ATK - Pemakaian jasa kebersihan kantor				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	300,000,000		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	300,000,000		
	3.25.01.1.06.03	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50,000,000		

	3.25.01.1.06.04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	50,000,000	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	50,000,000		
	3.25.01.1.06.05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	75,000,000	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	75,000,000		
	3.25.01.1.06.06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7,500,000	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7,500,000		
	3.25.01.1.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400,000,000	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400,000,000		
	3.25.01.1.06.10	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	150,000,000	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	150,000,000		
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terkelolanya administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	2,915,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terkelolanya administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	2,915,000,000		
	3.25.01.1.07.01	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	11 Unit	865,000,000	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	11 Unit	865,000,000		
	3.25.01.1.07.02	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	700,000,000	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	700,000,000		
	3.25.01.1.07.05	- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	150,000,000	- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	150,000,000		
	3.25.01.1.07.06	- Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	200,000,000	- Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	200,000,000		
	3.25.01.1.07.09	- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	700,000,000	- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	700,000,000		
	3.25.01.1.07.10	- Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	300,000,000	- Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	300,000,000		
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terkelolanya administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	655,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terkelolanya administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	655,000,000		
	3.25.01.1.08.01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,000,000	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,000,000		
	3.25.01.1.08.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	650,000,000	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	650,000,000		
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terkelolanya administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	1,200,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terkelolanya administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	1,200,000,000		

	3.25.01.1.09.01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	59 Unit	500,000,000	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	59 Unit	500,000,000			
	3.25.01.1.09.02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	100,000,000	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	100,000,000			
	3.25.01.1.09.09	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	500,000,000	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	500,000,000			
	3.25.01.1.09.10	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	100,000,000	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	100,000,000			
Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	PERSENTASE PENINGKATAN KAWASAN YANG LESTARI DAN TERLINDUNGI			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PERSENTASE PENINGKATAN KAWASAN YANG LESTARI DAN TERLINDUNGI					
			PENGELOLAAN RUANG LAUT OLEH MASYARAKAT PESISIR MAUPUN PENGUSAHA SESUAI PERDA RZWP3K	2 Izin	3,590,000,000		PENGELOLAAN RUANG LAUT OLEH MASYARAKAT PESISIR MAUPUN PENGUSAHA SESUAI PERDA RZWP3K	2 Izin	3,590,000,000			
			KAWASAN KONSERVASI YANG DIKELOLA SECARA BERKELANJUTAN	27.613,89 Ha			KAWASAN KONSERVASI YANG DIKELOLA SECARA BERKELANJUTAN	27.613,89 Ha				
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terkelolanya kawasan laut, pesisir dan konservasi			Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terkelolanya kawasan laut, pesisir dan konservasi					
			Persentase wilayah perairan yang dikelola berdasarkan RZWP3K	75%	3,040,000,000		Persentase wilayah perairan yang dikelola berdasarkan RZWP3K	75%	3,040,000,000			
	3.25.02.1.01.01	- Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Telaksananya sosialisasi perda dan pergub RZWP3K			- Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Telaksananya sosialisasi perda dan pergub RZWP3K					
			Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP3K	1 Dokumen	405,000,000		Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP3K	1 Dokumen	405,000,000			
	3.25.02.1.01.02	- Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Telaksananya rehabilitasi ikan lokal di kawasan konservasi/tubuk larangan			- Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Telaksananya rehabilitasi ikan lokal di kawasan konservasi/tubuk larangan					

			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	5.713,04 Ha	1,050,000,000		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	5.713,04 Ha	1,050,000,000			
	3.25.02.1.01.03	- Rehabilitasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	554,5 Ha	1,225,000,000		- Rehabilitasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil	554,5 Ha	1,225,000,000			
	3.25.02.1.01.04	- Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	60 Orang	360,000,000		- Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	60 Orang	360,000,000		
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terkelolanya wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil				Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terkelolanya wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil				
			Terbitnya perizinan yang sesuai dengan RZWP3K	2 Dokumen	120,000,000		Terbitnya perizinan yang sesuai dengan RZWP3K	2 Dokumen	120,000,000			
	3.25.02.1.02.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Tersedianya pergub tata cara izin lokasi dan izin pengelolaan RZWP3K				- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Tersedianya pergub tata cara izin lokasi dan izin pengelolaan RZWP3K				
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi				Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi					
	3.25.02.1.02.02	Penerbitan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	50,000,000		Penerbitan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	50,000,000		
	3.25.02.1.02.03	- Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Tertelaksananya pelatihan GIS				- Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Tertelaksananya pelatihan GIS				
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	40,000,000		Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	40,000,000			

	3.25.02.1.02.04	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan			Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan				
	3.25.02.1.02.05	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	2 Dokumen	30,000,000	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	2 Dokumen	30,000,000		
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat pesisir			Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat pesisir				
			Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat pesisir	4 Kelompok	430,000,000		Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat pesisir	4 Kelompok	430,000,000		
	3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	70,000,000	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	70,000,000		
	3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8 Kelompok	250,000,000	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8 Kelompok	250,000,000		
	3.25.02.1.03.03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	20 Orang	30,000,000	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	20 Orang	30,000,000		
	3.25.02.1.03.04	- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah sosialisasi bersih sampah plastik di pesisir			- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah sosialisasi bersih sampah plastik di pesisir				
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3 Kelompok	80,000,000		Jumlah Kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3 Kelompok	80,000,000		
Meningkatnya Produksi Perikanan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PRODUKTIVITAS PERIKANAN TANGKAP			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PRODUKTIVITAS PERIKANAN TANGKAP				
			JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	55.136,7 Ton	7,836,810,000		JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	55.136,7 Ton	7,836,810,000		
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya hasil perikanan tangkap di laut			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya hasil perikanan tangkap di laut				

			Meningkatnya produksi perikanan tangkap di laut	50.320,0 Ton	3,625,000,000		Meningkatnya produksi perikanan tangkap di laut	50.320,0 Ton	3,625,000,000		
3.25.03.1.01.01	- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data produksi perikanan tangkap di laut				- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data produksi perikanan tangkap di laut			1 Dokumen	200,000,000
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil				Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		200,000,000		
3.25.03.1.01.02	- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	- Jumlah prasarana perikanan tangkap - Jumlah sosialisasi alat tangkap ikan ramah lingkungan				- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	- Jumlah prasarana perikanan tangkap - Jumlah sosialisasi alat tangkap ikan ramah lingkungan			2500 Unit	3,285,000,000
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		3,285,000,000		
3.25.03.1.01.03	- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	15 Unit	140,000,000	- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	15 Unit	140,000,000			
3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terkelolanya sumber daya ikan di perairan umum daratan			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terkelolanya sumber daya ikan di perairan umum daratan			4,816,7 Ton	1,616,810,000	
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap di PUD	4,816,7 Ton	1,616,810,000		Meningkatnya produksi perikanan tangkap di PUD	4,816,7 Ton	1,616,810,000			
3.25.03.1.02.01	- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah produksi benih ikan			- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah produksi benih ikan			1 Dokumen	466,810,000	
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen		466,810,000	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen			466,810,000
3.25.03.1.02.02	- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah produksi benih ikan			- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah produksi benih ikan			350 Unit	1,010,000,000	
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	350 Unit		1,010,000,000	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	350 Unit			1,010,000,000

	3.25.03.1.02.03	- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	5 Unit	140,000,000	- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	5 Unit	140,000,000		
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya tata cara izin usaha perikanan tangkap untuk perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya tata cara izin usaha perikanan tangkap untuk perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT				
			Meningkatnya izin kapal perikanan tangkap berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT	34 Izin	520,000,000		Meningkatnya izin kapal perikanan tangkap berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT	34 Izin	520,000,000		
	3.25.03.1.03.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Tersusunnya SOP izin usaha perikanan tangkap kapal perikanan 10 GT sampai dengan 30 GT			- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Tersusunnya SOP izin usaha perikanan tangkap kapal perikanan 10 GT sampai dengan 30 GT				
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tagkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	350,000,000		Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tagkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	350,000,000		
	3.25.03.1.03.02	- Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah rekomendasi izin usaha perikanan tangkap kapal perikanan berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT yang terbit			- Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah rekomendasi izin usaha perikanan tangkap kapal perikanan berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT yang terbit				
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	34 Rekomendasi	150,000,000		Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	34 Rekomendasi	150,000,000		
	3.25.03.1.03.03	- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 Dokumen	20,000,000	- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 Dokumen	20,000,000		
	3.25.03.1.04	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Terlaksananya tata cara izin usaha perikanan tangkap untuk perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki nelayan kecil			Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Terlaksananya tata cara izin usaha perikanan tangkap untuk perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki nelayan kecil				

			Meningkatnya izin kapal perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil	19 Izin	325,000,000		Meningkatnya izin kapal perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil	19 Izin	325,000,000			
	3.25.03.1.04.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah SOP persyaratan dan prosedur izin usaha perikanan tangkap sampai dengan 10 GT ditetapkan				- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah SOP persyaratan dan prosedur izin usaha perikanan tangkap sampai dengan 10 GT ditetapkan				
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	175,000,000			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	175,000,000		
	3.25.03.1.04.02	- Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	19 Rekomendasi	150,000,000		- Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	19 Rekomendasi	150,000,000		
	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	20 Kapal	185,000,000		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	20 Kapal	185,000,000		
	3.25.03.1.05.01	- Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	110,000,000		- Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	110,000,000		
	3.25.03.1.05.02	- Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	20 Dokumen	75,000,000		- Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	20 Dokumen	75,000,000		
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terkelolanya pelabuhan perikanan				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terkelolanya pelabuhan perikanan				
			Jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan perikanan	4.180 Kapal	1,100,000,000			Jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan perikanan	4.180 Kapal	1,100,000,000		
	3.25.03.1.06.01	- Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan				- Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan				

	3.25.03.1.06.02	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	175,000,000	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	175,000,000		
	3.25.03.1.06.03	- Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	- Jumlah operasional PPI Nipah Panjang - Jumlah operasional UPTD PPP Kuala Tungkal			- Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	- Jumlah operasional PPI Nipah Panjang - Jumlah operasional UPTD PPP Kuala Tungkal				
			Fungsi pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	2 Layanan	925,000,000		Fungsi pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	2 Layanan	925,000,000		
	3.25.03.1.07	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terkelolanya penerbitan izin kapal pengadaan penangkap dan pengangkut ikan			Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terkelolanya penerbitan izin kapal pengadaan penangkap dan pengangkut ikan				
			Tersedianya izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	2 Kapal	195,000,000		Tersedianya izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	2 Kapal	195,000,000		
	3.25.03.1.07.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Tersusunnya SOP persyaratan dan prosedur pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan			- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Tersusunnya SOP persyaratan dan prosedur pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan				
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	135,000,000		Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	135,000,000		
	3.25.03.1.07.02	- Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terbitnya persetujuan pengadaan kapal			- Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terbitnya persetujuan pengadaan kapal				
			Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	60,000,000		Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	60,000,000		
	3.25.03.1.08	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut,	Terkelolanya pengadaan penangkap ikan dan pengangkut ikan			Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut,	Terkelolanya pengadaan penangkap ikan dan pengangkut ikan				

		Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya izin kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	5 Kapal	185,000,000	Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya izin kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	5 Kapal	185,000,000		
3.25.03.1.08.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	Tersusunnya SOP penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	125,000,000	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	Tersusunnya SOP penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan	1 Dokumen	125,000,000		
3.25.03.1.08.02	- Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Terbitnya persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	5 Rekomendasi	60,000,000	- Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Terbitnya persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan	5 Rekomendasi	60,000,000		
3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Tertelaksananya pendaftaran kapal perikanan tangkap berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah pendaftaran kapal perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	20 Kapal	85,000,000	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Tertelaksananya pendaftaran kapal perikanan tangkap berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT	20 Kapal	85,000,000		
3.25.03.1.09.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Tersusunnya SOP penetapan persyaratan dan prosedur pendaftaran kapal perikanan				- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Tersusunnya SOP penetapan persyaratan dan prosedur pendaftaran kapal perikanan				

			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	35,000,000		Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	35,000,000			
	3.25.03.1.09.02	- Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	20 Rekomendasi	50,000,000		- Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	20 Rekomendasi	50,000,000		
Meningkatnya Produksi Perikanan	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKTIVITAS PERIKANAN BUDIDAYA				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKTIVITAS PERIKANAN BUDIDAYA				
			MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	60.885,0 Ton	8,535,000,000		MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	60.885,0 Ton	8,535,000,000			
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terkelolanya izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan				Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terkelolanya izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan				
			Meningkatnya izin usaha pembudidayaan ikan	30 Izin	94,000,000		Meningkatnya izin usaha pembudidayaan ikan	30 Izin	94,000,000			
	3.25.04.1.01.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	35,000,000		- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	35,000,000		
	3.25.04.1.01.02	- Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah sosialisasi perizinan				- Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah sosialisasi perizinan				
Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan			1 Rekomendasi	25,000,000		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan		1 Rekomendasi	25,000,000			
3.25.04.1.01.03	- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembinaan CBIB				- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembinaan CBIB					
		Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan ikan di Laut Berdasarkan Sakala Usaha dan Tingkat Risiko	1 Dokumen	34,000,000			Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan ikan di Laut Berdasarkan Sakala Usaha dan Tingkat Risiko	1 Dokumen	34,000,000			
3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut sampai dengan 12 Mil serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Meningkatnya izin usaha pembudidayaan ikan di laut	3 Izin	60,000,000		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut sampai dengan 12 Mil serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Meningkatnya izin usaha pembudidayaan ikan di laut	3 Izin	60,000,000			

	3.25.04.1.02.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	35,000,000	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	35,000,000		
	3.25.04.1.02.02	- Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	25,000,000	- Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	25,000,000		
	3.25.04.1.03	Penerbitan Izin Kapal pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasi, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Tersedianya izin kapal pengangkut pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT	2 Izin	480,000,000	Penerbitan Izin Kapal pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasi, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Tersedianya izin kapal pengangkut pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT	2 Izin	480,000,000		
	3.25.04.1.03.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	180,000,000	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	180,000,000		
	3.25.04.1.03.02	- Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	300,000,000	- Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	300,000,000		
	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Jumlah pembudidaya ikan kecil yang memiliki Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di laut dan lintas Kabupaten/Kota	7 Kelompok	390,000,000	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Jumlah pembudidaya ikan kecil yang memiliki Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di laut dan lintas Kabupaten/Kota	7 Kelompok	390,000,000		
	3.25.04.1.04.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Rekomendasi	140,000,000	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Rekomendasi	140,000,000		

	3.25.04.1.04.02	- Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Rekomendasi	250,000,000	- Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Rekomendasi	250,000,000			
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Terkelolanya usaha di bidang perikanan budidaya			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Terkelolanya usaha di bidang perikanan budidaya					
			Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	9 Jenis	7,511,000,000	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	9 Jenis	7,511,000,000				
	3.25.04.1.05.01	- Penyediaan data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000	- Penyediaan data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000			
	3.25.04.1.05.02	- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	4 Unit	160,000,000	- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	4 Unit	160,000,000			
	3.25.04.1.05.03	- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah kegiatan akselerasi auditor CBIB - Jumlah prasarana pembudidayaan ikan			- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah kegiatan akselerasi auditor CBIB - Jumlah prasarana pembudidayaan ikan					
			Tersedianya prasarana pembudidayaan ikan dia air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	100 Unit	5,725,000,000	Tersedianya prasarana pembudidayaan ikan dia air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	100 Unit	5,725,000,000				
	3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	4 Unit	100,000,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	4 Unit	100,000,000			
	3.25.04.1.05.05	- Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah	Jumlah jenis pakan yang beredar sesuai standar			- Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau	Jumlah jenis pakan yang beredar sesuai standar					

		Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	6 Unit	571,000,000	Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	6 Unit	571,000,000		
	3.25.04.1.05.06	- Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel hama penyakit ikan di kawasan sentra produksi			- Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel hama penyakit ikan di kawasan sentra produksi				
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	2 Dokumen	615,000,000		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	2 Dokumen	615,000,000		
	3.25.04.1.05.07	- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	60 Orang	80,000,000	- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	60 Orang	80,000,000		
	3.25.04.1.05.08	- Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk Dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi	4 Ha	110,000,000	- Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk Dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi	4 Ha	110,000,000		
	3.25.04.1.05.09	- Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya Ikan yang mengikuti Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20 Orang	100,000,000	- Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya Ikan yang mengikuti Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20 Orang	100,000,000		
Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE PENINGKATAN KAWASAN YANG LESTARI DAN TERLINDUNGI			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE PENINGKATAN KAWASAN YANG LESTARI DAN TERLINDUNGI				
			PERSENTASE UNIT USAHA PERIKANAN YANG TAAT TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	70%	1,327,000,000		PERSENTASE UNIT USAHA PERIKANAN YANG TAAT TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	70%	1,327,000,000		
			PENANGANAN KASUS PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	50%			PENANGANAN KASUS PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	50%			

	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan			Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan					
			Persentase pelaku usaha perikanan yang terawasi	66%	776,000,000		Persentase pelaku usaha perikanan yang terawasi	66%	776,000,000			
	3.25.05.1.01.01	- Pengawasan Pemanfaatan Ruang laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang laut			- Pengawasan Pemanfaatan Ruang laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang laut					
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	3 Dokumen	130,000,000		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	3 Dokumen	130,000,000			
	3.25.05.1.01.02	- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya pengawasan usaha perikanan tangkap di laut			- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya pengawasan usaha perikanan tangkap di laut					
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	2 Dokumen	610,000,000		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	2 Dokumen	610,000,000			
	3.25.05.1.01.03	- Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	2 Dokumen	36,000,000	- Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	2 Dokumen	36,000,000			
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya pengawasan sumber daya ikan di wilayah perairan umum dan daratan			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya pengawasan sumber daya ikan di wilayah perairan umum dan daratan					
			Meningkatnya persentase pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan umum daratan	80%	551,000,000		Meningkatnya persentase pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan umum daratan	80%	551,000,000			

	3.25.05.1.02.01	- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Terlaksananya pengawasan usaha perikanan tangkap			- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Terlaksananya pengawasan usaha perikanan tangkap						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	3 Dokumen	331,000,000		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	3 Dokumen	331,000,000				
	3.25.05.1.02.02	- Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Terlaksananya pengawasan usaha perikanan budidaya			- Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Terlaksananya pengawasan usaha perikanan budidaya						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	3 Dokumen	125,000,000		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	3 Dokumen	125,000,000				
	3.25.05.1.02.03	- Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	95,000,000	- Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	95,000,000				
Meningkatnya angka konsumsi ikan	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	KONSUMSI IKAN PERKAPITA			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	KONSUMSI IKAN PERKAPITA						
			PENINGKATAN ANGKA KONSUMSI IKAN	41,50 Kg/Kapita/Tahun	5,061,500,000		PENINGKATAN ANGKA KONSUMSI IKAN	41,50 Kg/Kapita/Tahun	5,061,500,000				
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terkelolanya usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan			Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terkelolanya usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan						
			Terbitnya jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	4 izin	2,848,000,000		Terbitnya jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	4 izin	2,848,000,000				

	3.25.06.1.01.01	- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	- Jumlah kegiatan pemasaran - Jumlah pembinaan/pengembangan UPI - Jumlah sosialisasi persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha ikan hias - Jumlah workshop perhitungan angka konsumsi ikan			- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	- Jumlah kegiatan pemasaran - Jumlah pembinaan/pengembangan UPI - Jumlah sosialisasi persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha ikan hias - Jumlah workshop perhitungan angka konsumsi ikan						
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi	3 Rekomendasi	580,000,000		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi	3 Rekomendasi	580,000,000				
	3.25.06.1.01.02	- Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	- Jumlah sosialisasi informasi pasar provinsi jambi- Tersedianya data dan informasi pasar			- Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	- Jumlah sosialisasi informasi pasar provinsi jambi- Tersedianya data dan informasi pasar						
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3 Rekomendasi	375,000,000		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3 Rekomendasi	375,000,000				
	3.25.06.1.01.03	- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	- Jumlah kampanye Gemarikan - Jumlah bazar - Jumlah demonstrasi hasil perikanan - Jumlah lomba masak serba ikan - Jumlah operasional instalasi ikan hias telanaipura - Jumlah pengembangan ikan hias - Jumlah promosi dan pameran			- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	- Jumlah kampanye Gemarikan - Jumlah bazar - Jumlah demonstrasi hasil perikanan - Jumlah lomba masak serba ikan - Jumlah operasional instalasi ikan hias telanaipura - Jumlah pengembangan ikan hias - Jumlah promosi dan pameran						
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	3 Dokumen	1,893,000,000		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	3 Dokumen	1,893,000,000				

	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan						
			Jumlah UPI yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	7 Kelompok	1,278,500,000		Jumlah UPI yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	7 Kelompok	1,278,500,000				
	3.25.06.1.02.01	- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	- Jumlah sosialisasi pengembangan produk hasil perikanan - Terlaksananya bimbingan dan penerapan persyaratan usaha pengolahan dan pemasaran			- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	- Jumlah sosialisasi pengembangan produk hasil perikanan - Terlaksananya bimbingan dan penerapan persyaratan usaha pengolahan dan pemasaran						
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	13 Unit Usaha	981,200,000		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	13 Unit Usaha	981,200,000				
	3.25.06.1.02.02	- Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Terlaksananya bimbingan, pemantauan dan evaluasi mutu dan keamanan hasil perikanan			- Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Terlaksananya bimbingan, pemantauan dan evaluasi mutu dan keamanan hasil perikanan						
			Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	13 Unit Usaha	297,300,000		Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	13 Unit Usaha	297,300,000				
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan						
			Tersedianya informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1 Dokumen	935,000,000		Tersedianya informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1 Dokumen	935,000,000				

	3.25.06.1.03.01	- Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Utama Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	- Jumlah alih teknologi - Jumlah sarana unit pengolahan			- Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Utama Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	- Jumlah alih teknologi - Jumlah sarana unit pengolahan					
			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	65,000,000		Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	65,000,000			
	3.25.06.1.03.02	- Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bimtek SKP bagi pelaku usaha pengolahan perikanan			- Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bimtek SKP bagi pelaku usaha pengolahan perikanan					
			Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	10 Unit Usaha	500,000,000		Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	10 Unit Usaha	500,000,000			
	3.25.06.1.03.3	- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya SIM Logistik Ikan			- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya SIM Logistik Ikan					
			Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	1 Dokumen	370,000,000		Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	1 Dokumen	370,000,000			
	JUMLAH TOTAL				58,765,411,886	JUMLAH TOTAL			58,765,411,886			

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Forum OPD merupakan forum koordinasi antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Kegiatan Rakortek Renbang dengan OPD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dan dengan Instansi/Lembaga terkait, serta menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh OPD terkait.

Proses perencanaan partisipatif merupakan proses perencanaan atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*) yang diselenggarakan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, serta nasional.

Rakortek Renbang Kelautan dan Perikanan merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah Forum OPD. Forum ini cukup strategis karena mempertemukan kelompok masyarakat sektoral dan spasial.

Dalam forum ini dilakukan penyelarasan usulan antara hasil-hasil Musrenbang Kabupaten dengan Draft Rencana Kerja OPD, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi persoalan yang ada di sektor.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi setiap tahun melaksanakan acara forum OPD untuk menghimpun dan mensinergikan usulan-usulan kegiatan, baik yang berasal dari *Bottom up* maupun *Top down*. Setelah dilakukan analisis kesesuaian usulan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat semuanya memiliki kesamaan, sehingga dimungkinkan dapat dilaksanakan sepenuhnya apabila mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jambi. Proses selanjutnya, usulan-usulan tersebut kemudian di skala prioritas berdasarkan tingkat ketergesaan pemenuhan kebutuhan untuk kepentingan masyarakat.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 di bidang kelautan dan perikanan masih dapat dilihat dalam Tabel 2.19 sebagai berikut :

Tabel 2.19.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Provinsi Jambi

1. DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KERINCI						
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	Y/T	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	paket percontohan budidaya lele dengan teknologi bioflok	Kec. Siulak, Kec. Siulak Mukai dan Kec. Danau Kerinci Barat	4	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
2	paket percontohan pakan mandiri	Kec. Sitingau Laut dan Kec. Danau Kerinci Barat	3	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
3	Paket Pengadaan Budidaya Maggot	Kec. Siulak, Kec. Danau Kerinci Barat dan Kec. Air Hangat Timur	3	Paket	T	Akan diusulkan melalui dana APBN
4	pelatihan/Bimtek untuk Pendamping Teknis Perikanan	Kab. Kerinci	10	Orang	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
5	Pelatihan/Bimtek untuk Pembudidaya Ikan	Kab. Kerinci	20	Orang	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
6	Paket pengadaan Alat tangkap	Kec. Danau Kerinci dan Kec. Tanah Cogok	10	Paket	Y	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
7	Pengadaan Benih Ikan untuk Restocking di perairan umum (Danau/sungai)	Kec. Gunung Kerinci, Kec. Sitingau Laut dan Kec. Keliling Danau	5	Lokasi	Y	Jumlah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
8	Pembangunan Rumah Jaga Lubuk Larangan	Kec. Sitingau Laut dan Kec. Keliling Danau	3	Lokasi	Y	Akan diusulkan pada usulan Dana Alokasi Khusus (DAK)
9	Pengadaan Sarpras Pengawasan ikan perairan Umum	Kec. Gunung Kerinci, Kec. Sitingau Laut dan Kec. Keliling Danau	5	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
10	Pengadaan Sarpras UPI	Kec. Air Hangat Timur dan Kec. Danau Kerinci Barat	5	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
11	Gemarikan	Kab. Kerinci	1	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
12	Pelatihan Pengolahan Perikanan	Kab. Kerinci	20	Orang	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
2. DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TEBO						
1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan					
	- Pembinaan POKMASWAS	Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah, Desa Jambu Kec. Tebo Ulu, Desa Aburan Batang Tebo Kec. Tebo Tengah	3	Kelompok	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
	- Penyediaan Prasarana dan Sarana POKMASWAS	Desa Sungai alai Kec. Tebo Tengah	1	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
	- Restocking Benih Gurame	Danau Sigombak Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu	5000	Ekor	Y	Jumlah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
	- Restocking Benih Tembakang	Danau Sigombak Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu	50000	Ekor	Y	Jumlah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
2	Penguatan Daya Saing Produk Perikanan					
	- GEMARIKAN	Desa Teluk Pandak Kec. Tebo Tengah	50	Orang	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
	- Bimtek Keamanan Pangan Hasil Perikanan	Kel. Muara Tebo Kec. Tebo Tengah	30	Orang	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
	- Penyediaan Sarana Pengolahan Bandeng Presto	Desa Pulung Rejo Kec. Rimbo Ulu	1	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
3	Perikanan Budidaya					
	- Pengawasan Kesehatan Lingkungan	Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang	1	Paket	Y	Pada kegiatan kesehatan ikan

	- Pengawasan Hama Penyakit Ikan	Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang	1	Paket	Y	Pada kegiatan kesehatan ikan
4	Perikanan Tangkap					
	- Penyediaan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah	2	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
3. DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BATANGHARI						
I	Produksi Perikanan Budidaya					
1	Pengadaan Paket Bak bulat, Bibit dan Pakan	Kecamatan Pelayung	20	Unit	T	Akan diusulkan melalui dana APBN
2	Pengadaan Benih Nila dan Pakan untuk KJA	Kecamatan Muara Bulian Desa Aro	25	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
3	Pembangunan Gudang pakan mandiri	Kecamatan Pelayung	3	Unit	T	Akan diusulkan melalui DAK
4	Pengadaan Mesin Pakan Mandiri	Kecamatan Pelayung	5	Unit	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
5	Paket Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Gurame, Patin dan Lele)	8 Kecamatan Kab. Batang Hari	10	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
6	Pengadaan Induk Patin, Lele dan Peralatan UPR	Kecamatan Pelayung, Muara Bulian	2	Paket	T	Akan diusulkan melalui dana APBN
7	Mesin sedot Air Lumpur	Kecamatan Pelayung, Muara Bulian	3	Paket	T	Akan diusulkan melalui dana APBN
II	Pengelolaan Perikanan Tangkap					
8	Pengayaan stok ikan lokal (restocking)	3 Kecamatan Kab. Batang Hari	200,000	Ekor	Y	Jumlah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
9	Penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan ramah lingkungan	3 Kecamatan Kab. Batang Hari	3	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
4. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUNGO						
	Produksi perikanan budidaya belum optimal					
1	Bantuan calon induk dan pakan ikan nila dan gurami	Ds. Babeko Kec. Bathin II Babeko	1	Paket	T	Akan diusulkan melalui UPT BPBAT Sungai Gelam
		Ds. Pasar Rantau Embacang Kec. Tanah Sepenggal	1	Paket	T	Akan diusulkan melalui UPT BPBAT Sungai Gelam
		Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah	1	Paket	T	Akan diusulkan melalui UPT BPBAT Sungai Gelam
		Ds. Embacang Gedang Kec. Tanah Sepenggal Lintas	1	Paket	T	Akan diusulkan melalui UPT BPBAT Sungai Gelam
		Ds. Embacang Gedang, Kec. Tanah Sepenggal Lintas	1	Paket	T	Akan diusulkan melalui UPT BPBAT Sungai Gelam
		Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah	2	Paket	T	Akan diusulkan melalui UPT BPBAT Sungai Gelam
		Kel. Sungai Kerjan Kec. Bungo Dani	2	Paket	T	Akan diusulkan melalui UPT BPBAT Sungai Gelam
2	Pelatihan Pembudidayaan Ikan Lele dan Ikan Nila	Dalam Kabupaten Bungo	4	Kali	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
3	Bantuan Mesin Pelet Ikan	Kec. Pelepat dan Kec. Pelepat Ilir	2	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
	Produksi perikanan tangkap belum optimal					
1	Pengadaan Alat Tangkap untuk nelayan (Perahu dan alat tangkap ramah lingkungan)	Kec. Pelepat dan Kec. Tanah Sepenggal	20	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
2	Pengadaan Alat Tangkap untuk nelayan (Perahu dan alat tangkap ramah lingkungan)	Kec. Jujuhan Ilir dan Bathin II Babeko	20	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran

3	Bantuan peralatan untuk Pokmaswas (Senter, Jas Hujan, Kartu tanda Anggota pokmaswas, HandPhone dan GPS)	Kec. Batin III Ulu dan Kec. Tanah Sepenggal	2	Pokmaswas	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
4	Pengadaan Benih untuk Restocking (Benih Semah dan Gurami)	Kabupaten Bungo	300,000	ekor benih	Y	Jumlah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
Pelatihan pengolahan hasil perikanan						
1	Bantuan Peralatan Pengolahan Ikan asap (Oven, Kompor/tungku, Vacuum Seller dan Timbangan)	Ds. Dwi Karya Bakti, Ds. Embecang Gedang, Kel. Cadika	3	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
2	Bantuan mesin Mixer dan Penggoreng abon ikan	Ds. Sungai Buluh	1	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
3	Bantuan Ikan Konsumsi	Pesantren, Panti asuhan, Rumah Tahfis Qur'an dan Panti Jompo	1	Paket	T	Kegiatan yang merupakan pendukung pandemi Covid 19, kini tidak lagi dilaksanakan
4	Gemarikan	Kab Bungo	1	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
5. DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR						
I	Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap					
1	Bantuan Alat Tangkap Jaring untuk pendukung Program KALAJU TA 2022	Desa Kuala Simbur Kecamatan Sabak Timur	60	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
2	Bantuan Alat Tangkap Jaring untuk pendukung Program KALAJU TA 2023	Kel Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang	150	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
3	Bantuan Alat Tangkap Jaring	Kecamatan Kuala Jambi	75	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
4	Bantuan Alat Tangkap Jaring	Kecamatan Mendahara	75	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
5	Bantuan Alat Tangkap Jaring	Kecamatan Sabak Timur	75	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
6	Bantuan Alat Tangkap Jaring	Kecamatan Sadu	75	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
Sub Total I						
II	Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya					
1	Sarpras budidaya lele	Kecamatan Mendahara dan Kuala Jambi	5	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
2	Sarpras budidaya Udang Vaname	Kecamatan Sadu	1	Paket	T	Akan diusulkan melalui dana APBN
3	Sarpras Pembenuhan Rakyat	Kecamatan Rantau Rasau	2	Paket	T	Akan diusulkan melalui dana APBN
4	Sarpras Domestikasi Ikan lokal	Kecamatan Dendang dan Mend. Ulu	3	Paket	T	Diusulkan melalui Bidang Tangkap
5	Sarpras Budidaya Nila	Kecamatan Sabak Barat	5	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
6	Sarpras Budidaya Payau	Kecamatan Sabak Timur dan Mend. Ilir	3	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
7	Indukan Nila	BBI Dendang	1	Paket	T	Akan diusulkan melalui DAK
8	Rehab kolam BBI	BBI Dendang	1	Paket	T	Akan diusulkan melalui DAK
9	Sarpras Budidaya Gurame	Kec.Berbak, Dendang dan Sabak Barat	4	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
III	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan					
1	Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan	Poklhasar Merpati (Jl.Orang kayo Hitam Rt.05/03 Kel.Nipah Panjang I Kec.Nipah Panjang)	1	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran

2	Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan	Poklhasar Cahaya Laut (Jl.Orang kayo Hitam Rt.05/03 Kel.Nipah Panjang I Kec.Nipah Panjang)	1	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
3	Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan	Poklhasar Ampera Indah (Jl.Diamond Kel.Nipah Panjang I Kec.Nipah Panjang)	1	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
4	Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan	Poklhasar Mandiri 2 (Kel.Nipah panjang I Kec.Nipah Panjang)	1	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
5	Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan	Poklhasar Kelompok Usaha Bersama 3 (Lr Nelayan Kel.Nipah Panjang I Kec.Nipah Panjang)	1	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
6	Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan	Poklhasar Mawar (Lr Nelayan Kel.Nipah Panjang I Kec.Nipah Panjang)	1	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
7	Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan	Poklhasar Cahaya Kita (Lr Nelayan Kel.Nipah Panjang I Kec.Nipah Panjang)	1	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
8	Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan	Poklhasar Adelia (Jl.Arjuna Rt.025/02 Kel.Mendahara Ilir Kec.Mendahara)	1	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
9	Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan	Poklhasar Usaha Berkah Sejahtera (Jl.Maju Jaya Rt.010/003 Kel.Tanjung Solok Kec.Kuala Jambi)	1	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
10	Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan	Poklhasar Rezeki Harapan Sejahtera (Jl.Madrasah Rt.10/03 Kel.Kampung Laut Kec.Kuala Jambi)	1	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
11	Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan	Poklhasar Bunga Melati Indah (Dusun II Rt.004 Desa Majelis Hidayah Kec.Kuala Jambi)	1	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
12	Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan	Poklhasar Anugerah (Dusun II Rt.004 Desa Majelis Hidayah Kec.Kuala Jambi)	1	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
13	Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan	Poklhasar Cahaya (Dusun II Rt.004 Desa Majelis Hidayah Kec.Kuala Jambi)	1	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
14	Rehab UPI dan Sarana Prasarana	Poklhasar Ciknah (Kel. Rano Kec.Muara Sabak Barat)	1	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
15	Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan	Komplek Perkantoran Muara Sabak Kec.Muara Sabak Barat	1	Kegiatan	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
16	Bantuan Peralatan di Rumah Kemasan (Komputer PC, Printer dan Bahan Kemasan)	Rumah Kemasan Dinas Perikanan (Kel.Talang Babat Kec.Muara Sabak Barat)	1	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
	Sub Total III					
6. DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT						
I	Bidang Perikanan Tangkap					
1	BANTUAN ALAT PENANGKAPAN IKAN GILLNET 4 INCHI (JARING UDANG KETAK)	Kec. Tungkal Ilir, Kec. Kuala Betara	400	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
2	BANTUAN MESIN PENGGERAK KAPAL MOTOR	Kec. Tungkal Ilir	50	Unit	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
3	BANTUAN POMPONG, MESIN DAN ALAT TANGKAP GILLNET 4 INCHI	Kec. Tungkal Ilir, Kec. Kuala Betara	20	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
4	BANTUAN PERAHU, MESIN DAN ALAT TANGKAP GILLNET 2,5 INCHI	Kec. Seberang Kota	20	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
II	Bidang Perikanan Budidaya					

1	Bantuan paket budidaya ikan lele	Kec. Tungkal Ilir, Kec. Bramitam, Kec. Muara Papalik, Kec. Tebing Tinggi dan Kec. Batang Asam	8	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
2	Paket budidaya kerang darah di tambak	Desa Muara Sebrang Kec. Sebrang Kota	1	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
3	Paket budidaya ikan patin	Kec. Tungkal Ilir, Kec. Betara	3	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
4	Paket budidaya nila salin	Kec. Kuala Betara	1	Paket	T	Akan diusulkan melalui dana APBN
5	Paket budidaya ikan nila	Kec. Betara dan Kec. Renah Mendaluh	3	Paket	T	Akan diusulkan melalui dana APBN
6	Paket budidaya ikan gurame	Desa Lampisi Kec. Renah Mendaluh	2	Paket	T	Akan diusulkan melalui dana APBN
7	Bantuan bahan baku pakan	Kec. Tungkal Ilir, Kec. Betara, Kec. Tebing Tinggi dan Kec. Batang Asam	5	Paket	T	Akan diusulkan melalui dana APBN
7. DINAS PERIKANAN KABUPATEN MERANGIN						
1	Pelatihan CBIB/CPIB kelompok pembudidaya ikan	Kabupaten Merangin	10	Kelompok	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
2	Bantuan peralatan produksi perikanan budidaya kolam (untuk 10 kelompok pembudidaya ikan) Pengembangan budidaya magot	Kec. Bangko, Pamenang, Jangkat, Tabir, Sungai Manau, Lembah Masurai, Tabir Selatan	10	Paket	T	Akan diusulkan melalui dana APBN
3	Bantuan benih dan pakan ikan untuk 35 kelompok pembudidaya ikan	Kec. Bangko, Pamenang, Jangkat, Tabir, Sungai Manau, Lembah Masurai, Tabir Selatan	350000	Ekor	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
4	Bantuan pakan ikan untuk 35 kelompok pembudidaya ikan					
	- Pakan starter	Kec. Bangko, Pamenang, Jangkat, Tabir, Sungai Manau, Lembah Masurai, Tabir Selatan	700	Kg	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
	- Pakan grower min 2	Kec. Bangko, Pamenang, Jangkat, Tabir, Sungai Manau, Lembah Masurai, Tabir Selatan	7000	Kg	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
	- Pakan grower min 3	Kec. Bangko, Pamenang, Jangkat, Tabir, Sungai Manau, Lembah Masurai, Tabir Selatan	14000	Kg	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
5	Bantuan obat-obatan kesehatan ikan (untuk 20 kelompok pembudidaya perikanan)	Kec. Bangko, Pamenang, Jangkat, Tabir, Sungai Manau, Lembah Masurai, Tabir Selatan	20	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
6	Restocking/penebaran benih ikan di perairan umum/danau/lubuk larangan	Kawasan lubuk larangan berdasarkan Peraturan Bupati Merangin	30	Paket	Y	Jumlah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
7	Bimbingan dan pelatihan kelompok pengolahan perikanan	Kec. Bangko, Tabir selatan dan Pamenang, Jangkat	4	Kelompok	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
8	Bantuan sarana pengolahan ikan untuk 3 kelompok pengolahan ikan (oven pengering, penggiling ikan, Oven pengasapan, Lantai jemur ikan kering)	Kec. Bangko, Tabir Selatan, Pamenang, Jangkat	4	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
8. DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUARO JAMBI						
1	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang diusahakan dalam kabupaten/kota					
	a. Pengadaan perahu lengkap dengan mesin dan	Kec. Sekernan, Taman Rajo, Kumpeh, Jaluko, Kumpeh Ulu	50	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran

	alat tangkap					
	b. Pengadaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan					
	- Jala Tebar	Kec. Sekernan, Taman Rajo, Kumpeh, Jaluko, Kumpeh Ulu	100	Unit	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
	- Jaring Insang lengkap dengan Timah dan tali	Kec. Kumpeh, Taman Rajo, Jaluko	200	Unit	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
	- Kawat Tembilar	Kec. Sekernan, Kumpeh, Kumpeh Ulu, Kec. Sekernan. Maro Sebo	500	Gulung	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
2	Restocking benih ikan di suaka perikanan / Lubuk Larangan / Perairan umum lainnya					
	- Ikan Jelawat	Kec. Maro Sebo, Jaluko, Kumpeh Ulu	200,000	Ekor	Y	Jumlah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
	- Ikan Tembakang	Kec. Maro Sebo, Jaluko, Kumpeh Ulu	200,000	Ekor	Y	Jumlah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
	- Ikan Baung	Kec. Maro Sebo, Jaluko, Kumpeh Ulu	200,000	Ekor	Y	Jumlah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana pemasaran hasil perikanan					
	a. Pengadaan Freezer (Mesin Pembeku Ikan Segar)	Kec. Kumpeh	20	Unit	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
	b. Cool box	Kec. Kumpeh, Kec. Jaluko, Kec. Kumpeh Ulu	100	Unit	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana pasca Panen kolam Budidaya					
	a. Pengadaan Jaring Panen	Kec. Kumpeh Ulu, Kec. Sungai Gelam	30	Unit	T	Akan diusulkan melalui dana APBN
5	Pengembangan budidaya ikan di kolam					
	- Benih Ikan Patin	Kec. Kumpeh Ulu, Kec. Sungai Gelam	100,000	Ekor	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
	- Benih Ikan Nila	Kec. Kumpeh Ulu, Kec. Sungai Gelam	100,000	Ekor	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
	- Benih Ikan Gurame	Kec. Kumpeh Ulu, Kec. Sungai Gelam	50,000	Ekor	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
	- Pakan ikan	Kec. Kumpeh Ulu, Kec. Sungai Gelam	200,000	Kg	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
6	Pengembangan Budidaya di KJA					
	- Tali untuk KJA	Kec. Jaluko, Kec. Sekernan, Kec. Taman Rajo	500	Meter	T	Akan diusulkan melalui dana APBN
9. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SAROLANGUN						
1	Pengadaan alat tangkap untuk nelayan (perahu dan alat tangkap ramah lingkungan)	10 Kecamatan	10	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
2	Bantuan peralatan untuk Pokmaswas (senter, sepatu bot, jas hujan, kartu tanda	Lubuk Berdorong, Batang Asai, Berkun	3	Pokmaswas	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran

	anggota Pokmaswas dan GPS)					
3	Bantuan benih untuk Restocking	Batang Asai dan Lubuk Bedorong	50,000	Ekor	Y	Jumlah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
4	Pelatihan pengolahan hasil perikanan	Sarolangun	1	Kegiatan	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
5	Bantuan peralatan pengolahan ikan asap (Oven, kompor/tungku, ember, timbangan digital dan vacum sealer)	Singkut dan sarolangun	2	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
6	Bantuan mesin mixer dan penggoreng abon ikan dll	Sarolangun	1	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
7	Bantuan ikan konsumsi	Pondok pesantren	2	Paket	T	Kegiatan yang merupakan pendukung pandemi Covid 19, kini tidak lagi dilaksanakan
8	Gemarikan	SDN No. 03 Sarolangun	1	Kegiatan	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
9	Pelatihan budidaya perikanan	Singkut dan sarolangun	1	Kegiatan	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
10	Bantuan indukan dan sapras UPR	Sarolangun, Singkut dan Mandiangin	3	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
10. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA JAMBI						
1	Percontohan budidaya Gurame di kolam (benih, pakan dan peralatan)	KOTA JAMBI	10	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
2	Percontohan budidaya Lele di kolam (benih, pakan dan peralatan)	KOTA JAMBI	10	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
3	Sarana dan prasarana ikan hias	KOTA JAMBI	10	Paket	T	Akan diusulkan melalui dana APBN
4	Bantuan peralatan UPR (Blower, Bak Fiber, Tedmon, Genset, Akuarium, dll)	KOTA JAMBI	10	Paket	T	Akan diusulkan melalui DAK
5	Perahu bermesin	KOTA JAMBI	30	Unit		
6	Alat Tangkap Ramah Lingkungan (Anco)	KOTA JAMBI	50	Unit	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
7	Benih restocking	KOTA JAMBI	200,000	Ekor	Y	Jumlah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
8	Peralatan Pokmaswas	KOTA JAMBI	3	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
9	Peralatan Pengolahan Hasil perikanan (Kompor gas, pengadon/planetary mixer, chest frezeer)	KOTA JAMBI	10	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
10	Peralatan pemasaran ikan segar (cool box 200 lt dan timbangan digital)	KOTA JAMBI	100	Unit	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
11. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KOTA SUNGAI PENUH						
1	Pengadaan pakan ikan	Desa Simpang Tiga Kec. Hamparan Rawang	1.6	Ton	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran 2024
2	Pengadaan calon induk ikan unggul	Desa Talang Lindung Kec. Sungai Bungkal	15	Paket	T	Akan diusulkan melalui UPT BPBAT Sungai Gelam
3	Pengadaan calon induk ikan unggul	Desa Seberang Kec. Pesisir Bukit	4	Paket	T	Akan diusulkan melalui UPT BPBAT Sungai Gelam
4	Pengadaan calon induk ikan unggul	Desa Aur Duri Kec. Pondok Tinggi	4	Paket	T	Akan diusulkan melalui UPT BPBAT Sungai Gelam
5	Pembangunan rumah jaga lubuk larangan di wilayah kampung perikanan	Kampung perikanan			Y	Akan diusulkan pada usulan Dana Alokasi Khusus (DAK)

6	Pengadaan sapras penangkapan	Desa Tanjung Bunga Kec. Tanah Kampung	1	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
7	Pengadaan sapras penangkapan	Desa Pinggir Air Kec. Kumun Debai	1	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
8	Pengadaan sapras penangkapan	Desa Pinggir Air Kec. Kumun Debai	1	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
9	Pengadaan sapras penangkapan	Desa Pinggir Air Kec. Kumun Debai	1	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
10	Pengadaan sapras untuk kerompok penangkapan	Desa Tanjung Kec. Hampan Rawang	1	Paket	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
11	Pembangunan unit pengolahan ikan	Desa Tanjung Kec. Hampan Rawang	1	Unit	Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
12	Pembangunan pasar ikan higienis	Desa Tanjung Bunga Kec. Tanah Kampung			Y	Diajukan ke melalui dana APBN
13	Sarana dan prasarana di pasar ikan	Desa Tanjung Bunga Kec. Tanah Kampung			Y	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
14	Pembangunan balai penyuluh	Penyuluh Perikanan				
15	Pengadaan kendaraan operasional	Penyuluh Perikanan				

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang seyogyanya harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat, Maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mengajukan program/kegiatan ke kementerian yang terkait sebagai wujud partisipasi dalam mendukung program Pemerintah baik daerah maupun pusat, dalam hal ini mensejahterakan masyarakat nelayan, pembudidaya serta masyarakat pengolah dan pemasar hasil Kelautan dan Perikanan.

Kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Jambi dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional yaitu ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Kebijakan pembangunan perikanan dan perikanan di Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap;
2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya;
3. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat tentang RZWP3K;
4. Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi ekosistem vital di laut dan pesisir;
5. Meningkatkan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS);

6. Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
7. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung;
8. Meningkatkan kualitas SDM dan teknologi produksi hasil perikanan;
9. Penerapan cara pengolahan ikan yang baik;
10. Penerapan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
11. Sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran RPJMD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dalam kurun waktu 1 (satu) tahu. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi. Berdasarkan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi terkait dengan pencapaian misi pertama dari RPJMD Provinsi, yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Misi kedua dari RPJMD Provinsi, yaitu Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah.

Indikator tujuan RPJMD dari misi Pertama adalah Indeks Reformasi Birokrasi dan misi Kedua adalah pertumbuhan PDRB Hijau. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mendukung sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dan Memantapkan Pengelolaan Komoditas Unggulan Non Pertambangan dengan indikator sasaran sebagaimana pada Tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1. Rencana Tujuan dan Sasasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan produksi perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	54.480,9	54.807,8	55.136,7	55.467,5	55.800,3
			Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	57.168,0	58.997,0	60.885,0	62.833,0	64.843,6
2	Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K	2 Izin	2 Izin	2 Izin	2 Izin	2 Izin
			Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	10.687,49	16.400,53	27.613,89	33.447,08	39.143,44
			Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	60%	65%	70%	75%	77%
			Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	50%	50%	50%	50%	50%
3	Meningkatkan jumlah pelaku usaha perikanan	Meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan	Jumlah rumah tangga perikanan (RTP)	27.615	27.947	28.282	28.622	28.965
4	Meningkatkan angka konsumsi ikan	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	40,60	41,00	41,60	42,00	42,50
5	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	BB Indeks	A Indeks	A Indek	AA Indeks	AA Indeks

3.3. Program dan Kegiatan

Dengan terbitnya Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mengalami perubahan yang cukup besar karena Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah ditentukan pada Permendagri Tahun 2019 serta telah diimplementasikan pada aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak terkecuali Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang meliputi :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI.

- **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :**
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

- Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 2 dokumen.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD sebanyak 10 laporan.
- d. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 1 laporan.
- ***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :***
- a. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 156 orang/bulan
- b. Sub Kegiatan Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 1 dokumen.
- ***Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah :***
- a. Sub Kegiatan Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD.
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD sebanyak 1 dokumen.
- b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 2 laporan
- ***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :***
- a. Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan sebanyak 325 paket.

- b. Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 20 orang.
 - c. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 200 orang.
- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :**
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Indikator kinerja subkegiatan ini Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 3 paket.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 5 paket.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga.
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 1 paket.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor.
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 2 paket.
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan.
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 2 paket.
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan sebanyak 1 dokumen.
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan.

- h. Sub Kegiatan Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sebanyak 1 dokumen.
- ***Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :***
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan sebanyak 11 unit.
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan sebanyak 1 unit.
 - c. Sub Kegiatan pengadaan Mebel
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Paket Mebel yang Disediakan sebanyak 5 paket.
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan sebanyak 10 unit.
 - e. Sub Kegiatan Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan sebanyak 1 unit.
 - f. Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan sebanyak 10 unit.
- ***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 1 laporan.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 4 laporan.
- ***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

- a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya sebanyak 59 unit.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 4 unit.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 3 unit.
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 20 unit.

2. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

- ***Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil di luar Minyak dan Gas Bumi :***
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan dan penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP3K sebanyak 1 dokumen.
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola seluas 5.713,04 Ha.
 - c. Sub Kegiatan Rehabilitasi wilayah perairan dan pulau-pulau kecil
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi seluas 554,5 Ha.
 - d. Sub Kegiatan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 60 orang.

- ***Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi :***

- a. Sub Kegiatan Penerbitan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan sebanyak 2 rekomendasi.

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin lokasi dan izin-izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 Mil di luar minyak dan gas bumi bagi masyarakat lokal dan tradisional
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan sebanyak 2 rekomendasi.

- c. Sub Kegiatan Pencatatan dan pengadministrasian izin lokasi perairan dalam system kadaster laut
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut sebanyak 2 dokumen.

- ***Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil :***

- a. Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya sebanyak 60 orang.

- b. Sub kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebanyak 8 kelompok.

- c. Sub Kegiatan Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebanyak 20 orang

- d. Sub kegiatan Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebanyak sebanyak 3 kelompok.

3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

- ***Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil :***
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil sebanyak 1 dokumen.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil sebanyak 2.500 unit.
 - c. Sub Kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil sebanyak 15 unit.
- ***Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :***
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan data dan informasi
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat sebanyak 1 Dokumen
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat sebanyak 350 unit.
 - c. Sub Kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat sebanyak 5 unit.
- ***Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT :***
 - a. Sub Kegiatan Penetapan persyaratan dan prosedur izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi sebanyak 1 Dokumen.

- b. Sub Kegiatan Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan sebanyak 34 rekomendasi.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan data dan informasi usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia sebanyak 1 dokumen.

- ***Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil :***

- a. Sub Kegiatan Penetapan persyaratan dan prosedur izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi sebanyak 1 dokumen.

- b. Sub Kegiatan Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan sebanyak 19 rekomendasi.

- ***Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :***

- a. Sub Kegiatan Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi sebanyak 1 Dokumen

- b. Sub Kegiatan Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan sebanyak 20 dokumen.
- ***Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi:***
 - a. Sub kegiatan Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan
Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan sebanyak 1 pelabuhan perikanan.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia sebanyak 1 unit.
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan perusahaan pelabuhan perikanan
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Fungsi pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana 2 layanan.
- ***Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT :***
 - a. Sub Kegiatan Penetapan persyaratan dan prosedur persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi sebanyak 1 dokumen.
 - b. Sub Kegiatan Penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan sebanyak 2 rekomendasi.
- ***Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :***

- a. Sub Kegiatan Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi sebanyak 1 dokumen.
 - b. Sub Kegiatan penerbitan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi sebanyak 5 rekomendasi.
- ***Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT :***
- a. Sub Kegiatan Penetapan persyaratan dan prosedur pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi sebanyak 1 dokumen.
 - b. Sub Kegiatan Penerbitan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan sebanyak 20 rekomendasi.

4. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

- ***Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usaha Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :***
- a. Sub Kegiatan Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan sebanyak 1 rekomendasi.
 - b. Sub Kegiatan Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan sebanyak 1 rekomendasi.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan data dan informasi usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan ikan di Laut Berdasarkan Sakala Usaha dan Tingkat Risiko sebanyak 1 dokumen
- ***Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut sampai dengan 12 Mil serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing :***
 - a. Sub Kegiatan Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan sebanyak 1 rekomendasi
 - b. Sub Kegiatan Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan sebanyak 1 rekomendasi
- ***Kegiatan Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing :***
 - a. Sub Kegiatan Penetapan persyaratan dan prosedur izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Tersusunnya SOP dan prosedur izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan sebanyak 1 rekomendasi
 - b. Sub Kegiatan Penerbitan rekomendasi izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan sebanyak 1 rekomendasi

- ***Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Bagi pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :***
 - a. Sub Kegiatan Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) di laut dan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebanyak 1 rekomendasi.
 - b. Sub Kegiatan Penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) di laut dan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebanyak 1 rekomendasi
- ***Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut :***
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan di laut dan lintas daerah kabupaten/kota
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 Dokumen
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di laut
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut sebanyak 4 unit
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Tersedianya prasarana pembudidayaan ikan dia air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota sebanyak 100 unit.
 - d. Sub Kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan di laut
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut sebanyak 4 unit.

- e. Sub Kegiatan Penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Tersedianya sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota sebanyak 6 unit
- f. Sub Kegiatan Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di laut dan lintas daerah kabupaten/kota
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat sebanyak 2 dokumen
- g. Sub Kegiatan Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di laut dan kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Pembudidaya sebanyak 60 orang
- h. Sub Kegiatan Pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk Dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi seluas 4 Ha.
- i. Sub Kegiatan Pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Pembudidaya Ikan yang mengikuti Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebanyak 20 orang.

5. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

- ***Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil:***
 - a. Sub Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil
Indikator kinerja subkegiatan ini Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil sebanyak 3 dokumen.
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 Mil

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil sebanyak 2 dokumen.

- c. Sub Kegiatan Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Hasil pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sebanyak 2 dokumen.

- ***Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :***

- a. Sub Kegiatan Pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya sebanyak 3 dokumen

- b. Sub Kegiatan Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya sebanyak 3 dokumen.

- c. Sub Kegiatan Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebanyak 1 dokumen.

6. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

- ***Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :***
 - a. Sub Kegiatan Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi sebanyak 3 rekomendasi.
 - b. Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebanyak 3 rekomendasi.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko sebanyak 3 Dokumen
- ***Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar :***
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar
Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko sebanyak 13 unit usaha
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing sebanyak 13 unit usaha

- ***Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :***

- a. Sub Kegiatan Pemetaan dan Pemantauan kebutuhan bahan baku utama pengolahan/distribusi ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebanyak 1 Dokumen

- b. Sub Kegiatan Pemberian insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas sebanyak 10 unit usaha.

- c. Sub Kegiatan Pengembangan sistem informasi manajemen logistik ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

Indikator kinerja subkegiatan ini yaitu Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir sebanyak 1 Dokumen

Rencana program dan kegiatan yang terkait dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan berikut indikator kinerja, kelompok sasaran dan indikasi pendanaan tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI	Nilai SAKIP	Provinsi Jambi	A Indeks	22.972.614.530	APBD		AA Indeks	31.483.862.074	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Jambi	2 Laporan	642.582.100	APBD		2 Laporan	1.010.000.000	
3.25.01.1.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	2 Dokumen	179.899.600	APBD		2 Dokumen	280.000.000	
3.25.01.1.01.06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Jambi	10 Laporan	157.831.200	APBD		10 Laporan	210.000.000	
3.25.01.1.01.07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	1 Laporan	304.851.300	APBD		1 Laporan	520.000.000	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelola administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Jambi	12 Bulan	20.469.461.041	APBD		12 Bulan	27.326.362.074	
3.25.01.1.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Jambi	156 Orang/Bulan	20.170.862.641	APBD		158 Orang/Bulan	26.716.362.074	
3.25.01.1.02.02	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Jambi	1 Dokumen	298.598.400	APBD		1 Dokumen	610.000.000	

3.25.01.1.03	Administrtasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan keuangan	Provinsi Jambi	100%	170.822.400	APBD		100%	150.000.000
3.25.01.1.03.06	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Jambi	2 Laporan	170.822.400	APBD		2 Laporan	150.000.000
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya disiplin ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Jambi	1 Tahun	147.887.200	APBD		1 Tahun	310.000.000
3.25.01.1.05.09	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Jambi	20 Orang	18.000.000	APBD		20 Orang	100.000.000
3.25.01.1.05.10	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Jambi	200 Orang	129.887.200	APBD		200 Orang	210.000.000
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Terkelolanya administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Jambi	12 Bulan	508.033.770	APBD		12 Bulan	832.500.000
3.25.01.1.06.02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Jambi	5 Paket	74.517.520	APBD		5 Paket	300.000.000
3.25.01.1.06.04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi Jambi	2 Paket	22.800.000	APBD		2 Paket	50.000.000
3.25.01.1.06.05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi Jambi	2 Paket	35.024.250	APBD		2 Paket	75.000.000
3.25.01.1.06.06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Provinsi Jambi	1 Dokumen	8.640.000	APBD		1 Dokumen	7.500.000
3.25.01.1.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Jambi	12 Laporan	367.052.000	APBD		12 Laporan	400.000.000
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terkelolanya administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Jambi	12 Bulan	131.269.900	APBD		12 Bulan	500.000.000

3.25.01.1.07.06	- Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi Jambi	10 Unit	43.069.900	APBD		10 Unit	200.000.000
3.25.01.1.07.10	- Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi Jambi	10 Unit	88.200.000	APBD		10 Unit	300.000.000
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terkelolanya administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Jambi	12 Bulan	538.108.119	APBD		12 Bulan	655.000.000
3.25.01.1.08.01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Jambi	1 Laporan	5.000.000	APBD		1 Laporan	5.000.000
3.25.01.1.08.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi Jambi	4 Laporan	533.108.119	APBD		4 Laporan	650.000.000
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terkelolanya administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Jambi	12 Bulan	364.450.000	APBD		12 Bulan	700.000.000
3.25.01.1.09.01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi Jambi	59 Unit	208.310.000	APBD		59 Unit	500.000.000
3.25.01.1.09.02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi Jambi	4 Unit	130.800.000	APBD		4 Unit	100.000.000
3.25.01.1.09.10	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Jambi	20 Unit	25.340.000			20 Unit	100.000.000
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PENGELOLAAN RUANG LAUT OLEH MASYARAKAT PESISIR MAUPUN PENGUSAHA SESUAI PERDA RZWP3K	Provinsi Jambi	2 Izin	809.816.080	APBD		2 Izin	1.170.000.000

		KAWASAN KONSERVASI YANG DIKELOLA SECARA BERKELANJUTAN	Provinsi Jambi	27.613,89 Ha		APBD		33.447,08 Ha	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase wilayah perairan yang dikelola berdasarkan RZWP3K	Provinsi Jambi	75%	809.816.080			90%	1.170.000.000
3.25.02.1.01.02	- <i>Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat</i>	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Provinsi Jambi	5.713,04 Ha	577.968.080	APBD		11.213,36 Ha	1.170.000.000
3.25.02.1.01.04	- <i>Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Provinsi Jambi	60 Orang	231.848.000	APBD		60 Orang	360.000.000
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Provinsi Jambi	55.136,7 Ton	7.253.849.053	APBD		55.467,5 Ton	4.870.000.000
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Meningkatnya produksi perikanan tangkap di laut	Provinsi Jambi	50.320,0 Ton	759.141.600	APBD		49.755,0 Ton	3.595.000.000
3.25.03.1.01.02	- <i>Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap</i>	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Provinsi Jambi	2500 Unit	759.141.600	APBD		3000 Unit	3.595.000.000
3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya produksi perikanan tangkap di PUD	Provinsi Jambi	4.816,7 Ton	100.159.210	APBD		5.712,5 Ton	1.125.000.000
3.25.03.1.02.02	- <i>Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap</i>	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Provinsi Jambi	350 Unit	100.159.210	APBD		400 Unit	1.125.000.000

3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan perikanan	Provinsi Jambi	4.180 Kapal	6.394.548.243	APBD		4.340 Kapal	150.000.000	
3.25.03.1.06.02	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Provinsi Jambi	1 Unit	6.144.515.443	APBD		1 Unit	150.000.000	
3.25.03.1.06.03	- Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Provinsi Jambi	2 Layanan	250.032.800	APBD		2 Layanan	990.000.000	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Provinsi Jambi	60.885,0 Ton	5.158.437.084	APBD		62.833,0 Ton	23.547.600.000	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Provinsi Jambi	9 Jenis	144.108.800	APBD		9 Jenis	15.178.800.000	
3.25.04.1.05.06	- Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Provinsi Jambi	2 Dokumen	144.108.800	APBD		2 Dokumen	670.000.000	
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Provinsi Jambi	9 Jenis	5.014.328.284	APBD		9 Jenis	8.368.800.000	
3.25.04.1.05.03	- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya prasarana pembudidayaan ikan dia air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	Provinsi Jambi	100 Unit	4.737.030.484	APBD		100 Unit	6.140.000.000	

3.25.04.1.05.05	- Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	Provinsi Jambi	6 Unit	277.297.800	APBD		6 Unit	580.000.000	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE UNIT USAHA PERIKANAN YANG TAAT TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Provinsi Jambi	70%	672.486.089	APBD		75%	998.800.000	
		PENANGANAN KASUS PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Provinsi Jambi	50%		APBD		50%		
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase pelaku usaha perikanan yang terawasi	Provinsi Jambi	66%	449.596.089	APBD		68%	650.000.000	
3.25.05.1.01.02	- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Provinsi Jambi	2 Dokumen	449.596.089	APBD		2 Dokumen	650.000.000	
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya persentase pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan umum daratan	Provinsi Jambi	80%	222.890.000	APBD		82%	348.800.000	
3.25.05.1.02.01	- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Provinsi Jambi	3 Dokumen	222.890.000	APBD		3 Dokumen	348.800.000	

3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PENINGKATAN ANGKA KONSUMSI IKAN	Provinsi Jambi	41,50 Kg/Kapita/Tahun	846.302.940	APBD		42,00 Kg/Kapita/Tahun	3.981.800.000	
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbitnya jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Provinsi Jambi	4 izin	334.619.340	APBD		4 izin	2.065.600.000	
3.25.06.1.01.03	<i>- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Provinsi Jambi	3 Dokumen	334.619.340	APBD		3 Dokumen	2.065.600.000	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah UPI yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	Provinsi Jambi	7 Kelompok	244.533.200	APBD		9 Kelompok	1.401.200.000	
3.25.06.1.02.01	<i>- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</i>	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Provinsi Jambi	13 Unit Usaha	72.739.200	APBD		13 Unit Usaha	1.076.200.000	
3.25.06.1.02.02	<i>- Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing</i>	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Provinsi Jambi	13 Unit Usaha	171.794.000	APBD		13 Unit Usaha	325.000.000	

3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Provinsi Jambi	1 Dokumen	267.150.400	APBD		1 Dokumen	515.000.000	
3.25.06.1.03.02	- Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	Provinsi Jambi	10 Unit Usaha	267.150.400	APBD		10 Unit Usaha	515.000.000	
JUMLAH TOTAL					37.713.505.576				66.052.062.074	

BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Kelautan dan Perikanan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rancangan Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Rancangan Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI	Nilai SAKIP	Provinsi Jambi	A Indeks	22.972.614.530	APBD
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Jambi	2 Laporan	642.582.100	APBD
3.25.01.1.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	2 Dokumen	179.899.600	APBD
3.25.01.1.01.06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD	Provinsi Jambi	10 Laporan	157.831.200	APBD
3.25.01.1.01.07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	1 Laporan	304.851.300	APBD
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelola administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Jambi	12 Bulan	20.469.461.041	APBD
3.25.01.1.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Jambi	156 Orang/Bulan	20.170.862.641	APBD
3.25.01.1.02.02	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Jambi	1 Dokumen	298.598.400	APBD
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan keuangan	Provinsi Jambi	100%	170.822.400	APBD
3.25.01.1.03.06	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Jambi	2 Laporan	170.822.400	APBD
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya disiplin ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Jambi	1 Tahun	147.887.200	APBD
3.25.01.1.05.09	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Jambi	20 Orang	18.000.000	APBD
3.25.01.1.05.10	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Jambi	200 Orang	129.887.200	APBD

3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Terkelolanya administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Jambi	12 Bulan	508.033.770	APBD
3.25.01.1.06.02	- <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Jambi	5 Paket	74.517.520	APBD
3.25.01.1.06.04	- <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi Jambi	2 Paket	22.800.000	APBD
3.25.01.1.06.05	- <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi Jambi	2 Paket	35.024.250	APBD
3.25.01.1.06.06	- <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Provinsi Jambi	1 Dokumen	8.640.000	APBD
3.25.01.1.06.09	- <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Jambi	12 Laporan	367.052.000	APBD
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terkelolanya administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Jambi	12 Bulan	131.269.900	APBD
3.25.01.1.07.06	- <i>Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya</i>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi Jambi	10 Unit	43.069.900	APBD
3.25.01.1.07.10	- <i>Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi Jambi	10 Unit	88.200.000	APBD
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terkelolanya administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Jambi	12 Bulan	538.108.119	APBD
3.25.01.1.08.01	- <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Jambi	1 Laporan	5.000.000	APBD
3.25.01.1.08.02	- <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi Jambi	4 Laporan	533.108.119	APBD
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terkelolanya administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Jambi	12 Bulan	364.450.000	APBD
3.25.01.1.09.01	- <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi Jambi	59 Unit	208.310.000	APBD
3.25.01.1.09.02	- <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi Jambi	4 Unit	130.800.000	APBD

3.25.01.1.09.10	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Jambi	20 Unit	25.340.000	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PENGELOLAAN RUANG LAUT OLEH MASYARAKAT PESISIR MAUPUN PENGUSAHA SESUAI PERDA RZWP3K	Provinsi Jambi	2 Izin	809.816.080	APBD
		KAWASAN KONSERVASI YANG DIKELOLA SECARA BERKELANJUTAN	Provinsi Jambi	27.613,89 Ha		APBD
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase wilayah perairan yang dikelola berdasarkan RZWP3K	Provinsi Jambi	75%	809.816.080	
3.25.02.1.01.02	- Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Provinsi Jambi	5.713,04 Ha	577.968.080	APBD
3.25.02.1.01.04	- Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Provinsi Jambi	60 Orang	231.848.000	APBD
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Provinsi Jambi	55.136,7 Ton	7.253.849.053	APBD
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Meningkatnya produksi perikanan tangkap di laut	Provinsi Jambi	50.320,0 Ton	759.141.600	APBD
3.25.03.1.01.02	- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Provinsi Jambi	2500 Unit	759.141.600	APBD
3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya produksi perikanan tangkap di PUD	Provinsi Jambi	4.816,7 Ton	100.159.210	APBD
3.25.03.1.02.02	- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Provinsi Jambi	350 Unit	100.159.210	APBD
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan perikanan	Provinsi Jambi	4.180 Kapal	6.394.548.243	APBD
3.25.03.1.06.02	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Provinsi Jambi	1 Unit	6.144.515.443	APBD

3.25.03.1.06.03	- Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Provinsi Jambi	2 Layanan	250.032.800	APBD
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Provinsi Jambi	60.885,0 Ton	5.158.437.084	APBD
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Provinsi Jambi	9 Jenis	144.108.800	APBD
3.25.04.1.05.06	- Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Provinsi Jambi	2 Dokumen	144.108.800	APBD
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Provinsi Jambi	9 Jenis	5.014.328.284	APBD
3.25.04.1.05.03	- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	Provinsi Jambi	100 Unit	4.737.030.484	APBD
3.25.04.1.05.05	- Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	Provinsi Jambi	6 Unit	277.297.800	APBD
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE UNIT USAHA PERIKANAN YANG TAAT TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Provinsi Jambi	70%	672.486.089	APBD
		PENANGANAN KASUS PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Provinsi Jambi	50%		APBD
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase pelaku usaha perikanan yang terawasi	Provinsi Jambi	66%	449.596.089	APBD
3.25.05.1.01.02	- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Provinsi Jambi	2 Dokumen	449.596.089	APBD

3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya persentase pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan umum daratan	Provinsi Jambi	80%	222.890.000	APBD
3.25.05.1.02.01	- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Provinsi Jambi	3 Dokumen	222.890.000	APBD
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PENINGKATAN ANGKA KONSUMSI IKAN	Provinsi Jambi	41,50 Kg/Kapita/Tahun	846.302.940	APBD
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbitnya jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Provinsi Jambi	4 izin	334.619.340	APBD
3.25.06.1.01.03	- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Provinsi Jambi	3 Dokumen	334.619.340	APBD
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah UPI yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	Provinsi Jambi	7 Kelompok	244.533.200	APBD
3.25.06.1.02.01	- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Provinsi Jambi	13 Unit Usaha	72.739.200	APBD
3.25.06.1.02.02	- Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Provinsi Jambi	13 Unit Usaha	171.794.000	APBD

3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Provinsi Jambi	1 Dokumen	267.150.400	APBD
3.25.06.1.03.02	- Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	Provinsi Jambi	10 Unit Usaha	267.150.400	APBD
JUMLAH TOTAL					37.713.505.576	

BAB 5

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2024. Seluruh elemen pelaksana di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024 wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas serta partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran ini merupakan hasil kerja dari semua jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang didukung oleh seluruh masyarakat khususnya yang bergerak di sektor Kelautan dan Perikanan akan tetapi dilihat dari capaian yang ditargetkan dalam RPJMD Provinsi Jambi masih belum tercapai, walau demikian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi akan terus memacu agar yang telah ditargetkan dapat tercapai.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Provinsi Jambi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran

APBD, DAK, dan APBN Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan.

Dengan adanya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Sangat disadari bahwa Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024 ini belum sempurna. Sehubungan dengan itu masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Renja sangat diharapkan sehingga Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi untuk tahun-tahun selanjutnya akan menjadi lebih baik.

“Perencanaan yang baik bukan berarti segala-galanya, Tetapi
Tanpa perencanaan yang baik, segala-galanya menjadi tidak berarti”

Jambi, Juli 2023

KEPALA DINAS

TEMA WISMAN, S.Pi.
Pembina Utama Madya
NIP. 19681021 199903 1 002

LAMPIRAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI

